

KK
KKB

CR. 14/12

Sah
2

Ilmu Sosial

**LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2011**



**ANALISIS KULTURAL-POLITIK KEKERASAN MAHASISWA
DI KOTA MAKASSAR**

Peneliti :

**Ali Sahab, S.IP., M.Si.
Fahrul Muzaqqi, S.IP.**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing
Nomor : 004/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, tanggal 14 April 2011

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2011

b. Halaman Pengesahan

1. Judul : "ANALISIS KULTURAL-POLITIK KEKERASAN MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR"
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Ali Sahab
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 198206032009121001
 - d. Jabatan Fungsional : --
 - e. Jabatan Struktural : --
 - f. Bidang Keahlian : Perilaku Politik, Metode Kuantitatif
 - g. Fakultas/Jurusan/Pusat Penelitian : FISIP/ Ilmu Politik
 - h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 - i. Tim Peneliti

No.	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Fahrul Muzaqqi, S.IP.	Metode Kualitatif, Budaya Politik	FISIP, Ilmu Politik	Universitas Airlangga

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian

- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 6 (enam) bulan
- b. Biaya total yang diusulkan : Rp. 49.955.000,00
- c. Biaya total yang disetujui tahun 2011 :

Surabaya, 9 November 2011

Ketua Peneliti,


Ali Sahab, S.IP, M.Si

NIP. 198206032009121001

Mengetahui,
Dekan Fisip UnairDrs. Ignatius Basis Susilo, M.A

NIP. 195408081981031007

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM)
Universitas AirlanggaDr. Djoko Agus Purwanto, Apt., M.Si.

NIP. 195908051987011001

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN DAN SUMMARY

Fenomena kekerasan mahasiswa di Makassar dalam beberapa tahun terakhir kian menjadi perhatian semakin banyak pihak. Beragam pendekatan, teori hingga paradigma dihadirkan untuk menjelaskan fenomena itu. Akan tetapi diantara semuanya, paling tidak terdapat satu asumsi mendasar yang bisa dihadirkan, yakni bahwa mahasiswa – dalam konteks kekerasan yang seringkali melibatkan mereka – cenderung diposisikan terlebih sebagai objek daripada subjek dari kekerasan itu sendiri. Dalam konteks ini mahasiswa bukanlah aktor utama kekerasan melainkan hanya sebagai instrumen (perantara atau media) dari aktor-aktor yang lebih besar di belakangnya, seperti alumni, kelompok kepentingan, organisasi, bahkan pemerintah.

Di sisi lain, dilihat dari ranah maupun motif kekerasan yang muncul – di samping ranah sosio-politik – salah satunya adalah ranah kultural, yakni bagaimana kekerasan itu muncul dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor kultural sekaligus kekerasan tersebut mengkultur. Artinya, penelitian ini sebenarnya memiliki pranggapan bahwa kekerasan mahasiswa di Makassar yang meletup sewaktu-waktu itu tidak dapat dilepaskan dari konstruksi budaya yang membingkai mahasiswa – sebagai bagian dari masyarakat secara umum – sekaligus juga membentuk semacam *habitus* kekerasan yang melazim (membatin) dalam kehidupan sehari-hari.

Dirunut lebih jauh dari akar budaya, di Makassar sendiri terdapat setidaknya dua kerajaan besar pada zaman dahulu, yaitu kerajaan Bone dan kerajaan Goa (Makassar). Dua kerajaan ini memiliki mitos, cara pandang, tindakan dan *habitus* berbeda. Perbedaan inilah yang mengendap dalam sanubari etnis yang ada di bawahnya untuk kemudian bisa keluar sewaktu-waktu hingga tak jarang menjadi bagian dari motif kekerasan yang muncul di kalangan mahasiswa. Namun demikian, akar budaya itu memang kami sadari bukanlah satu-satunya dan paling utama

menjadi pemicu kekerasan yang muncul melainkan seringkali ada kelit-kelindan dengan faktor-faktor lain seperti politik, ekonomi, sosial, baik di lingkungan internal maupun eksternal kampus. Penelitian ini berikhtiar untuk mengupas secara mendalam bagaimana konstruksi kultural itu membingkai kekerasan hingga terbentuk pola (yang juga menjadi asumsi kami) bahwa kultur yang mengandung muatan kekerasan menjadi penyebab munculnya kekerasan sekaligus kekerasan itu sendiri semakin mengkultur di kalangan mahasiswa.

Di sisi lain, sebagaimana di atas, kekerasan yang bersifat kultural yang terjadi di kalangan mahasiswa Makassar tidaklah menjadi satu-satunya. Di sinilah poin menarik yang kiranya patut diberi perhatian lebih. Diantara sebaran kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa motif-motif yang melatarbelakangi munculnya kekerasan mahasiswa tersebut paling besar adalah sentimen antar fakultas, khususnya terhadap fakultas teknik yang dianggap superior. Sedangkan motif yang bersifat kultur justru mengemuka terutama di lingkungan kampus UIN, di samping di beberapa kampus swasta. Penelusuran dan analisis yang kami lakukan pada akhirnya sampai pada temuan bahwa faktor kultur memang menjadi salah satu variabel yang memicu muncul dan terpeliharanya kekerasan. Kultur yang maskulin, superior dan cenderung eksklusif, ditambah dengan reproduksi secara terus menerus cerita-cerita, mitos-mitos, hingga sentimen-sentimen dan karakter mental yang menempatkan diri lebih unggul dibanding yang lain secara langsung maupun tidak langsung telah mengkonstruksi alam (bawah) kesadaran yang dalam taraf tertentu membenarkan nalar kekerasan di kalangan mahasiswa. Hal inilah yang, apabila dianalisis secara teoretik, membentuk pola yang berhubungan secara timbal balik antara nalar kekerasan yang terbentuk di kalangan individu per individu mahasiswa dengan struktur maskulin, superior dan eksklusif yang mengkonstruksi kesadaran mereka.

PRAKATA

Tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekerasan mahasiswa di Makassar yang diteliti dari perspektif kultural-politik. Perspektif kultural-politik dimaksudkan untuk menelusuri keterkaitan benang merah antara fenomena maraknya kekerasan mahasiswa di Kota Makassar dengan konstruksi budaya yang membentuk kesadaran dan karakter mental mahasiswa Makassar. Pun, konstruksi budaya tersebut tidak dapat dilepaskan juga dari variabel politik, yakni lebih pada bagaimana konstruksi budaya itu menjadi potensi untuk diinstrumentalisasikan dalam upaya memperebutkan sumber daya (*resource*) di antara mahasiswa maupun elemen-elemen kepentingana yang lain. Asumsinya mengikuti definisi realis dari politik, yakni segala hal yang terkait dengan upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Di samping faktor kekuasaan, kekerasan mahasiswa yang muncul juga dilatarbelakangi oleh faktor-faktor kultural sekaligus kekerasan tersebut mengultur. Artinya, penelitian ini sebenarnya memiliki pra-anggapan bahwa kekerasan mahasiswa di Makassar yang meletup sewaktu-waktu itu tidak dapat dilepaskan dari konstruksi budaya yang membingkai mahasiswa – sebagai bagian dari masyarakat secara umum – sekaligus juga membentuk semacam *habitus* kekerasan yang melazim (membatin) dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, fenomena maraknya kekerasan yang terjadi di Makassar sangat terkait juga dengan bagaimana karakter mental orang Makassar yang dibentuk dari konstruksi budayanya. Karakter mental yang bersifat maskulin, superior dan eksklusif cenderung potensial memunculkan benturan-benturan kepentingan/identitas apabila dihadapkan pada perbedaan (entah pemikiran, sikap, kepentingan, atau lebih luas lagi ego).

Singkatnya, penelitian Hibah Bersaing yang didanai oleh Dirjen Dikti ini berupaya menyelami bagaimana konstruksi kekerasan mahasiswa di Makassar sebagai spiral yang cenderung mereproduksi diri berikut standar-standar kelaziman untuk melegitimasi tindak kekerasan yang dilakukan. Tentunya dalam upaya tersebut penelitian ini masih menemui kelemahan-kelemahan, baik substansi maupun teknis,

yang kiranya membutuhkan perbaikan di sana-sini atau penelitian lebih lanjut untuk memperluas atau memperdalam apa yang sudah ditemukan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang mendalam bagi semua pihak yang turut serta membantu dalam proses pencarian data, komentar-komentar dalam penyusunan laporan hingga penyempurnaan secara keseluruhan penelitian ini. Semoga temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi khasanah wawasan baru berikut rekomendasi kebijakan untuk meminimalisir kekerasan yang yang kami susun dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan yang terkait.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II STUDI PUSTAKA	4
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
BAB IV METODE PENELITIAN	12
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	17
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	41
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	46
B. DRAF ARTIKEL ILMIAH	
C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar.1. Peta Kerajaan Gowa dan Bone hal. 28**
Gambar.2. Senjata Tradisional Masyarakat Bugis-Makassar (Badik). hal. 29

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kekerasan mahasiswa di Makassar dalam beberapa tahun belakangan menjadi suatu kajian yang menarik. Terlebih untuk kebutuhan analisis bagaimana kekerasan itu dipetakan dari beragam sudut pandang dan bagaimana alternatif solusi untuk meredam atau bahkan mengantisipasi potensi-potensi kekerasan yang sewaktu-waktu masih bisa muncul. Dalam intensitas kekerasan yang muncul itu – walaupun grafiknya tidak selalu naik – sedikit banyak melahirkan asumsi bahwa mahasiswa sebenarnya bukanlah subjek utama dari kekerasan melainkan mereka tidak lebih hanya sebagai subjek-objek yang berkelit-kelindan dari struktur sosio-ekonomi-politik-kultural yang lebih besar.

Dalam bidang sosio-politik, misalnya, mahasiswa kerap melakukan aksi demonstrasi yang ujung-ujungnya bentrok fisik entah dengan aparat kepolisian, aparat maupun pejabat kampus, masyarakat atau di kalangan mahasiswa sendiri. Sebagai partisipan yang turut andil dalam mengawal suatu kebijakan (entah yang berasal dari negara maupun dari kampus), tak jarang memunculkan ketidakpuasan-ketidakpuasan yang melahirkan kekerasan. Kekerasan seringkali menjadi alternatif langkah taktis yang memang dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Namun terkadang kekerasan itu maujud secara tidak sadar (dengan sendirinya) tanpa perencanaan sebelumnya. Pun demikian dalam hal ekonomi-politik. Ketimpangan ekonomi yang melatarbelakangi masyarakat di sekitar kampus atau secara luas dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan mahasiswa. Ketika harga-harga sembako atau BBM naik, misalnya, segenap elemen mahasiswa merasa harus melakukan sesuatu untuk mencegah kondisi ekonomi di masyarakat semakin buruk. Namun alih-alih mencegah kondisi masyarakat makin buruk yang terjadi justru

mahasiswa semakin memperburuk kondisi tersebut dengan perusakan, kerusuhan dan kekerasan yang dilakukannya.

Selain itu, dalam arena perebutan kekuasaan, mahasiswa juga potensial menjadi instrumen untuk melancarkan upaya memperoleh kekuasaan. Momen Pemilu, Pilkada hingga Pemilihan Rektor (Pilrek), misalnya, mahasiswa kerap dijadikan sebagai *bumper* untuk mendulang suara bagi elit-elit yang sedang berkontestasi. Upaya untuk mendulang suara tersebut tak jarang membuahkan kekerasan yang melibatkan mahasiswa sebagai aktornya. Lebih sempit lagi, dalam perebutan kekuasaan di internal mahasiswa, seperti Pemilu Raya (Pemira) di kampus, mahasiswa melakukan upaya mobilisasi di kalangan mereka untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Mobilisasi itu menggunakan taktik diantaranya dengan pemaksaan, ancaman, teror hingga kekerasan secara fisik.

Kasus-kasus kekerasan mahasiswa yang meletus di Makassar, mulai yang menyangkut isu-isu besar berskala nasional hingga urusan privat seperti rebutan pacar atau tersinggung karena dihina, menghadirkan pada kita betapa kompleks kekerasan mahasiswa itu. Kompleksitas dimensi kekerasan itu tidak bisa serta-merta dipandang secara *gebyah-uyah* sehingga membutuhkan satu solusi yang mujarab untuk segala bentuk kekerasan. Sederet penyebab kekerasan kiranya bisa diidentifikasi. *Pertama* adalah menumpuknya keresahan dan ketidakpuasan rakyat atas situasi sosial, ekonomi dan politik yang mereka rasakan dalam hidup kesehariannya. *Kedua*, tersumbatnya aspirasi masyarakat dalam format pembangunan politik dan atau terdapatnya ketimpangan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik dan hukum-sebagai akibat politik massa mengambang yang dilakukan oleh rejim Soeharto dulu. *Ketiga*, besarnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. *Keempat*, terkait praktek-praktek korupsi dan manipulasi yang intensitasnya semakin tinggi dan makin gamblang dihadapan rakyat. Selain beberapa sebab yang lazim diungkapkan itu menjadi teramat menarik untuk menelisik kekerasan mahasiswa dari perspektif kultural-politik, yakni apakah kekerasan mahasiswa yang masih kerap muncul di

Makassar memiliki keterkaitan dengan struktur budaya yang membingkai masyarakat Makassar secara lebih luas.

Penjelasannya begini, bahwa dalam kasus-kasus kekerasan mahasiswa yang terjadi di Makassar tidaklah tertutup kemungkinan terkait dengan akar budaya yang telah lama meresap dalam masyarakatnya. Akar budaya itu membentuk karakter masyarakatnya sedemikian rupa sehingga dalam konteks-konteks tertentu kandungan budaya itu muncul ke permukaan secara disengaja ataupun tidak. Kandungan budaya itu, lebih lanjut, membuka kemungkinan adanya unsur-unsur kekerasan di dalamnya seperti ingatan sosial akan peristiwa masa lalu yang telah melegenda, identitas etnis yang merasa lebih superior, mitos-mitos yang bermuatan simbol-simbol kekerasan hingga transformasi kesemuanya itu (maupun hal-hal lain) dalam kehidupan modern.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penelitian ini sebenarnya ingin mengupas lebih dalam paling tidak menyangkut tiga hal, yaitu: a) Mengidentifikasi motif kekerasan yang dilakukan oleh aktor mahasiswa khususnya yang terkait dengan struktur budaya-politik; b) Menghasilkan rekomendasi praktis (desain kebijakan) untuk mencegah dan mengatasi kekerasan di kalangan mahasiswa bagi para *stakeholder* terkait; c) Menganalisis secara kultural (antropologis) dan politik atas kekerasan politik mahasiswa serta seluruh potensi kekerasan yang mempengaruhi kehidupan kampus dan masyarakat kota Makassar.

BAB II STUDI PUSTAKA

Spiral kekerasan memang telah dan akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Bentang spiral itu meliputi beragam aspek dari politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, hingga taraf yang lebih individual, yakni orang per orang (psikologis). Penelitian ini sebenarnya merupakan salah satu upaya mendefinisikan kekerasan dengan sekup spesifik seputar kehidupan mahasiswa di Makassar. Perspektif yang digunakan pun lebih menyempit pada aspek kultural berikut relasi kuasa di dalamnya. Kekerasan kultural, demikian istilah yang barangkali bisa mewakili ruh penelitian ini, tidaklah dapat dilepaskan dari persoalan kekuasaan yang melekat pada struktur tertentu, dalam hal ini adalah budaya masyarakat. Struktur budaya yang mengandung muatan kekerasan inilah yang hendak dibedah dalam penelitian ini.

Sebuah teori sosiologi populer menjelaskan bahwa keterkaitan antara struktur (termasuk budaya di dalamnya) dengan agen (aktor atau pelaku) dalam taraf tertentu menghasilkan tindakan-tindakan yang bersifat searah atau juga timbal balik. Artinya, budaya membentuk bagaimana karakteristik manusia di dalamnya sehingga tindakan-tindakan yang diambil oleh seseorang merupakan cermin dari budaya yang membingkainya. Pun sebaliknya, tindakan-tindakan tersebut dalam taraf tertentu juga mereproduksi budaya lama atau mungkin juga menggeser budaya lama menjadi budaya baru.

Anthony Giddens (1984; 1989) dengan jernih menjelaskan relasi struktur dan agen tersebut dalam Teori Strukturasi-nya. Ia berangkat dengan mengkritik moda struktur yang dibangun oleh pendahulunya, Talcott Parson, yakni Fungsionalisme Struktural. Dalam perspektif Fungsionalisme Struktural Parsonian, struktur dan agen sifatnya cenderung “dualisme”, yakni saling bersitegang atau bertentangan. Agen, dalam tindakan-tindakannya selalu dipengaruhi oleh struktur tanpa ada ruang bagi

agen untuk bisa mereproduksi atau memproduksi ulang struktur yang melingkupinya. Struktur, dalam perspektif Fungsionalisme, cenderung bersifat stabil, statis dan teratur. Giddens menawarkan pandangan bahwa relasi keduanya lebih bersifat “dualitas”, yakni terdapat hubungan saling mempengaruhi dalam lintas ruang dan waktu. Bagi Giddens, struktur bukanlah istilah bagi totalitas gejala, bukan pula kode-kode tersembunyi (strukturalisme), dan bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas (fungsionalisme).

Struktur versi Giddens dipahami sebagai aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Secara lebih detail, struktur terdiri dari tiga gugus besar: a) signifikasi, yang terdiri dari skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana; b) penguasaan/dominasi, yakni penguasaan atas orang (politik) dan atas barang (ekonomi), dan c) pembenaran/legitimasi: skemata peraturan normatif berupa hukum. Dualitas, kaitannya dengan itu, terletak pada proses dimana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Oleh karenanya, di sini posisi agen tidaklah bersifat pasif hanya sebagai penerima dan menjalankan apa yang ada dalam strukturnya sebagai sesuatu yang seolah sudah *taken for granted*.

Selain Giddens, teoretisi struktur-agensi adalah Margaret Archer (1982). Ia melihat secara lain perihal relasi tersebut, yakni keterkaitan (*linkage*) antara agensi dan kultur. Term kultur (*culture*) di sini merujuk pada fenomena non-material dan ide-ide yang dilawankan dengan term struktur (*structure*), yakni fenomena material dan kepentingan-kepentingan (Ritzer, 2005: 5). Lebih lanjut, Archer memfokuskan teorinya pada apa yang disebutnya dengan konsep “morfogenesis (*morphogenesis*)” dan “morfostasis (*morphostasis*)”. Morfogenesis dipahami sebagai proses dimana pertukaran rumit dalam sistem mengarah tidak hanya pada struktur dari sistem itu secara keseluruhan melainkan juga menghasilkan elaborasi struktural pada akhirnya. Morfogenesis melibatkan hal-hal yang muncul dari aksi dan interaksi, sekaligus membedakan diantara keduanya. Artinya, struktur yang ada dapat berindak secara

agen untuk bisa mereproduksi atau memproduksi ulang struktur yang melingkupinya. Struktur, dalam perspektif Fungsionalisme, cenderung bersifat stabil, statis dan teratur. Giddens menawarkan pandangan bahwa relasi keduanya lebih bersifat “dualitas”, yakni terdapat hubungan saling mempengaruhi dalam lintas ruang dan waktu. Bagi Giddens, struktur bukanlah istilah bagi totalitas gejala, bukan pula kode-kode tersembunyi (strukturalisme), dan bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas (fungsionalisme).

Struktur versi Giddens dipahami sebagai aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Secara lebih detail, struktur terdiri dari tiga gugus besar: a) signifikasi, yang terdiri dari skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana; b) penguasaan/dominasi, yakni penguasaan atas orang (politik) dan atas barang (ekonomi), dan c) membenaran/legitimasi: skemata peraturan normatif berupa hukum. Dualitas, kaitannya dengan itu, terletak pada proses dimana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Oleh karenanya, di sini posisi agen tidaklah bersifat pasif hanya sebagai penerima dan menjalankan apa yang ada dalam strukturnya sebagai sesuatu yang seolah sudah *taken for granted*.

Selain Giddens, teoretisi struktur-agensi adalah Margaret Archer (1982). Ia melihat secara lain perihal relasi tersebut, yakni keterkaitan (*linkage*) antara agensi dan kultur. Term kultur (*culture*) di sini merujuk pada fenomena non-material dan ide-ide yang dilawankan dengan term struktur (*structure*), yakni fenomena material dan kepentingan-kepentingan (Ritzer, 2005: 5). Lebih lanjut, Archer memfokuskan teorinya pada apa yang disebutnya dengan konsep “morfogenesis (*morphogenesis*)” dan “morfostasis (*morphostasis*)”. Morfogenesis dipahami sebagai proses dimana pertukaran rumit dalam sistem mengarah tidak hanya pada struktur dari sistem itu secara keseluruhan melainkan juga menghasilkan elaborasi struktural pada akhirnya. Morfogenesis melibatkan hal-hal yang muncul dari aksi dan interaksi, sekaligus membedakan diantara keduanya. Artinya, struktur yang ada dapat berindak secara

dialektis antara aksi dan interaksi. Sedangkan morfostasis merujuk pada ketiadaan perubahan dalam aksi dan interaksi tersebut. Diantara keduanya, morfogenesis dan morfostasis, merupakan proses yang berlangsung sepanjang waktu dan memiliki fokus pada sejumlah perubahan struktural yang potensial, pertukaran aksi dan interaksi dan pengembangan struktural yang dimungkinkan. Apabila kita bandingkan relasi agen-struktur versi Acher dan Giddens di atas, barangkali benang merah yang menyamakan keduanya adalah terdapat hubungan yang saling mempengaruhi secara timbal balik antara struktur dan agen dalam membentuk maupun dibentuk oleh struktur maupun, dalam term Acher, kultur.

Di samping Giddens dan Archer, seorang pemikir Prancis tak kalah penting berkontribusi terhadap pengembangan interaksi antara struktur dan agen. Dia adalah Pierre Bourdieu (1977; 1984; 1990). Teorinya tentang habitus dan ranah (*habitus and field*) didasarkan pada hasratnya untuk membongkar apa yang disebutnya dengan pemisah yang tidak perlu antara objektivisme (*objectivism*) atau struktur yang lebih luas dengan subjektivisme (*subjectivism*) atau agensi yang lebih luas. Bourdieu memfokuskan teorinya pada relasi dialektik diantara dua hal itu berikut *outcome*-nya yang ia sebut dengan praktik. Teori yang kemudian diberinya nama “Strukturalisme-Konstruktivis (*constructivist-structuralism*)” ini mengaitkan pada persoalan bagaimana aktor memandang dunia sosialnya (*social world*) berdasar pada lokasi tempat aktor itu berada. Sudut pandang aktor itu, bagaimanapun, dipengaruhi oleh struktur dunia sosialnya yang mengandung batasan maupun pengaturan dalam persepsi aktor itu. Ketertarikan Bourdieu terletak pada hubungan (*relationship*) – tidak selalu dialektika – antara struktur sosial dan struktur mental. Ia menggunakan istilah “habitus” dan “ranah” untuk mendeskripsikan dua komponen mayor dalam teorinya.

Habitus merujuk pada struktur kognitif seseorang yang berhadapan dengan dunia sosial. Habitus ini diistilahkan dengan “menstrukturi struktur (*structuring structure*)” dimana ia mempengaruhi dan dipengaruhi bagaimana aktor

menghadapi dunia sosial di luarnya. Tiap individu memiliki habitusnya yang didasarkan pada posisinya dengan lingkungan sosial. Dengan kata lain, ia – orang berikut habitusnya – dipengaruhi oleh beragam hal seperti umur, tingkat kemakmuran, seksualitas, penampilan fisik, pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan ranah (*field*), di sisi lain, bukanlah struktur, namun term yang digunakan untuk menggambarkan rangkaian hubungan diantara posisi di dalam ranah tersebut. Ia tidak menggambarkan ikatan sosial diantara lokus-lokus objektif (*objective locations*) di dalamnya, melainkan keberadaan independen dari, entah aktor atau institusi, yang merupakan bagian dari ranah itu dan bertindak untuk membatasinya. Ranah merupakan semacam medan pertempuran dimana berbagai posisi di dalamnya bertempur untuk mengembangkan posisinya dengan cara melampaui berbagai modal (*capital*) yang ada pada dirinya (sosial, ekonomi, simbolik dan kultural).

Terakhir, teoretisi kontemporer yang juga terlibat dalam pembahasan relasi struktur-agen ini adalah Jürgen Habermas (1987; 1991; Muzaqqi, 2008: II-41 – II-62). Teorinya yang terkenal disebutnya dengan “Kolonisasi Dunia Kehidupan (*colonization of lifeworld*)”. Habermas, yang mengembangkan Teori Tindakan Komunikatif (*Theory of Communicative Action*), dimana ia sangat mengkampanyekan komunikasi yang terbuka dan bebas, khawatir pada merembesnya sistem terhadap dunia kehidupan (*lifeworld* atau dalam bahasa Jerman diistilahkan dengan *lebenswelt*). Ia mendefinisikan sistem, menggunakan term Weber, sebagai wilayah keberadaan rasionalitas formal (*zweckrationaliteit*) atau kadang disebut dengan rasionalitas bertujuan sedangkan dunia kehidupan didefinisikan sebagai rasionalitas substantif (*substantive rationality*) atau kadang disebut dengan rasionalitas komunikatif. Kolonisasi Dunia Kehidupan, oleh karenanya, dipahami sebagai peningkatan rasionalitas formal yang menggeser keberadaan rasionalitas substantif dalam kehidupan manusia. Ide ini mirip dengan apa yang oleh Weber disebut dengan “sangkar besi rasionalitas (*iron cage of rationality*)”. Dunia kehidupan adalah perspektif internal yang menuntun aktor untuk memahami dunia

luar (atau sistem). Dunia kehidupan merupakan cakrawala yang terus melingkupi tindakan sosial sebagai latar belakang yang diterima begitu saja dan sudah “selalu ada” di sana ketika kita bertindak (pre-refleksif).¹

Habermas menganalisa dua konseptualisasi masyarakat tersebut lebih banyak dari perspektif disiplin ilmu sosiologi daripada filsafat. Wilayah sistem merupakan wilayah negara dan pasar yang digerakkan dengan rasionalitas bertujuan (rasionalitas sasaran). Sedangkan wilayah dunia kehidupan merupakan wilayah komunitas, adat-istiadat, agama, keyakinan-keyakinan lokal (kontekstual), dan sebagainya yang mempunyai komponen dasar berupa ‘kebudayaan’, ‘tatanan institusional’ dan ‘struktur kepribadian’. Dunia kehidupan merupakan wilayah komunikasi sehari-hari yang digerakkan oleh rasionalitas komunikatif (yang di dalamnya terdapat ruang privat maupun ruang publik). Menurut Habermas, sebagaimana dikutip oleh McCarthy:

¹ Habermas mengkritik konsep fenomenologis *lebenswelt* dari Husserl sampai Schutz yang bias kulturalis; dari tradisi struktural fungsional Durkheim dan Parsons yang bias institusional; dan dari tradisi interaksionisme simbolis Mead yang ‘satu sisi’ hanya dari perspektif sosialisasi (individuasi) (Habermas, 2006: xxviii dan xxxi). Habermas menjelaskan model *lebenswelt* fenomenologis masih berpegang pada model filsafat kesadaran (Habermas, 2007: 176). Magnis Suseno mendefinisikan lebih jelas mengenai sistem dan dunia kehidupan (*lebenswelt*). Sistem adalah segala macam institusi dan peraturan yang menata kehidupan masyarakat. Tujuan sistem adalah untuk meringankan beban komunikasi sehingga masyarakat tidak perlu mendiskusikan segala permasalahan secara terus menerus. Sedangkan dunia kehidupan (*lebenswelt*) adalah alam bermakna yang dimiliki bersama dengan komunitasnya, yang terdiri atas pandangan dunia, keyakinan-keyakinan moral dan nilai-nilai bersama (Suseno, 2004: 8-9). Bur Rasuanto melengkapi penjelasan tentang *lebenswelt*. Menurutnya, *lebenswelt* mengacu pada fenomenologi Husserl yang diartikan sebagai horison yang selamanya hadir dalam tindakan sosial. Menurut Habermas, definisi *lebenswelt* seharusnya multidimensional, ialah “stok pola-pola interpretatif yang tersebar secara budaya dan terorganisasikan secara linguistik. Artinya bahasa dan budaya adalah konstitutif bagi *lebenswelt*. Dalam arti ini aktor-aktor komunikatif selamanya bergerak dalam horison *lebenswelt*-nya: mereka tidak bisa melangkah di luarnya. Bagi Habermas, *lebenswelt* Husserl masih dalam konteks pemikiran metafisik atau filsafat kesadaran. Habermas menjelaskan *lebenswelt* dari perspektif komunikasi dalam interaksi sosial. Sementara integrasi sistem berkenaan dengan pandangan bahwa masyarakat bagaikan kesatuan yang punya mekanisme mengatur diri menyesuaikan lingkungan, integrasi sosial merupakan sistem institusi dimana subjek yang bertindak dan berbicara berinteraksi (Rasuanto, 2005: 119-120; Habermas, 1973: 45; 1984: 124-125).

Dalam aspek fungsional *pencapaian pemahaman*, tindakan komunikatif berfungsi sebagai 'transmisi' dan 'pembaharu' pengetahuan kultural; dalam aspek *koordinasi* tindakan, dia berfungsi melakukan 'integrasi sosial' dan membangun 'solidaritas' kelompok; dalam aspek *sosialisasi*, dia membentuk identitas personal (Habermas, 2006: xxix).

Lebih lanjut, Kolonisasi Dunia Kehidupan menurut Habermas dipahami sebagai dominasi sistem atas dunia kehidupan walaupun pada konteks demokrasi yang menjanjikan kondisi sebaliknya atau keseimbangan keduanya. Walaupun sistem, dalam konsepsi Habermas, berakar pada dunia kehidupan, ia memiliki karakteristik yang berbeda dari dunia kehidupan. Ia cenderung melebarkan wilayahnya dan memperkuat diri melalui rasionalitas bertujuan yang mendesak dunia kehidupan. Dalam taraf lebih jauh, kolonisasi itu akan merusak reproduksi kultural, integrasi sosial dan formasi personal yang ada dalam dunia kehidupan.

Alhasil, kembali ke persoalan awal, relasi struktur-agen dalam perkembangannya, khususnya dalam khasanah keilmuan di Eropa, menjadi salah satu teori berpengaruh untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial masyarakat modern dewasa ini. Penelitian ini berikhtiar menelisik fenomena kekerasan mahasiswa di Makassar dengan menggunakan pijakan teori struktur-agen tersebut. Kekerasan, demikian ketika hendak menjelaskan dari perspektif teori struktur-agen, merupakan fenomena yang bisa muncul karena relasi-relasi struktural yang ada – khususnya struktur budaya (atau kultur dalam term Archer) – memang potensial melahirkan hal itu. Dalam konteks demikian, agen memiliki dependensi sekaligus independensi terhadap determinasi struktural yang melahirkan kekerasan itu. Seorang agen memiliki dependensi struktural ketika ia selalu dan terus-menerus mereproduksi struktur budaya yang mengandung kekerasan itu, sebaliknya ia memiliki independensi ketika bisa menjaga jarak atas determinisme kultural dan berupaya mengembangkan dunia kehidupannya yang nir-kekerasan.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana struktur budaya-politik turut mempengaruhi kemunculan kekerasan mahasiswa di Makassar. Dari identifikasi itu nantinya dibangun alternatif solusi untuk menanggulangi bagaimana penyikapan terhadap budaya kekerasan yang ada dalam masyarakat Makassar termasuk mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mendesain kebijakan dan penataan kelembagaan sosio-kultural bagi dunia akademik di kampus. Lebih spesifik, tujuan-tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi motif kekerasan yang dilakukan oleh aktor mahasiswa khususnya yang terkait dengan struktur budaya-politik;
- b. Menghasilkan rekomendasi praktis (desain kebijakan) untuk mencegah dan mengatasi kekerasan di kalangan mahasiswa bagi para *stakeholder* terkait.
- c. Menganalisis secara kultural (antropologis) dan politik atas kekerasan politik mahasiswa serta seluruh potensi kekerasan yang mempengaruhi kehidupan kampus dan masyarakat kota Makassar.

III.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian dengan tema serupa yang telah ada namun dengan perspektif atau cara pandang yang berbeda yang tentunya lebih lengkap dari penelitian yang pernah dibuat. Nilai penting dari penelitian ini adalah memahami kekerasan mahasiswa di Kota Makassar secara lebih mendalam dan memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan pendidikan di Kota Makassar untuk bersama-sama menghentikan kekerasan mahasiswa.

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk bahan pembuatan model kebijakan pemerintah daerah maupun kampus untuk mengurangi atau mengeliminir tindak kekerasan mahasiswa Makassar. Model kebijakan ini diharapkan juga bermanfaat bagi *stake holder* lainnya dalam mengurangi tindak kekerasan dan penanganan kekerasan khususnya yang dilakukan (terkait dengan) mahasiswa.

BAB IV METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam proposal ini kami (tim peneliti) paparkan mengenai asumsi-asumsi desain penelitian, prosedur pengumpulan data, prosedur pencatatan data, prosedur analisa data dan langkah-langkah pembuktian dengan mengacu pada model prosedur yang dijelaskan oleh John W. Creswell (2002: 138)

1. Asumsi-asumsi Desain Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma yang berakar dalam antropologi budaya dan sosiologi. Pada umumnya, paradigma ini merupakan sebuah proses investigasi untuk memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengklasifikasikan subjek penelitian, yakni kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Beberapa asumsi teoritik dalam penelitian ini kami rumuskan sebagai berikut:

- Kekerasan mahasiswa di Kota Makassar cenderung digunakan sebagai metode/alat untuk mendramatisasikan tuntutan-tuntutan (*instrumental*) maupun penegasan identitas (*constitutive*) yang telah terinternalisasi dalam perilaku keseharian mahasiswanya;
- Kekerasan mahasiswa di Makassar tidak dapat dilepaskan dari relasi struktural yang melingkupi kehidupan mahasiswanya. Relasi struktural itu, khususnya struktur budaya, yang pada gilirannya menghasilkan cara berpikir sekaligus tindakan yang cenderung mengarah pada tindak kekerasan;
- Kekerasan yang muncul kemudian direproduksi terus-menerus sehingga pada taraf lebih jauh akan menjadi *habitus* yang melingkupi kehidupan

mahasiswa, sekaligus pula menguatkan tradisi kekerasan yang dibentuk dari akar budaya di Makassar;

- Bahwa fenomena kekerasan itu bisa direduksi paling rendah dengan *threatments* tertentu atau solusi yang sesuai dengan kasus-kasus dan dimensi kekerasan yang ada, khususnya dimensi kultural.

Dari asumsi yang diangkat di dalam penelitian sebagaimana kami rumuskan di atas, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) yang membatasi penelitian pada bidang disiplin ilmu politik, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya kaitan dengan sosiologi, antropologi dan disiplin-disiplin ilmu yang lain.

Penelitian ini bersifat interpretatif sehingga bias, nilai, dan penelitian kami akan kami nyatakan secara tegas dalam laporan penelitian. Penelitian ini membatasi subjek penelitian pada kasus-kasus kekerasan mahasiswa di Kota Makassar yang telah menjadi jalinan rantai yang sedemikian rupa sehingga sudah sangat mengkhawatirkan berbagai pihak. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan ilmu politik, penelitian ini dilakukan selama 6 bulan di tahun 2011.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menggambarkan kekerasan dan vandalisme yang dilakukan mahasiswa Makassar dari analisis kultural-politik.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di universitas-universitas yang ada di Kota Makassar.

4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang ada di beberapa Universitas di Makassar.

5. Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini dalam menentukan informan dengan menggunakan teknik snowball dari informan kunci (*key informan*).

6. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan:

(a) Penetapan batas-batas penelitian. Penelitian ini membatasi subjek penelitian pada kasus-kasus kekerasan mahasiswa di Kota Makassar; (b) Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui pengamatan langsung, wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, pengumpulan data-data dokumentasi dan data-data visual; dan (c) Penetapan prosedur untuk mencatat informasi dan/atau data.

7. Prosedur Pencatatan Data

Dalam penelitian ini pencatatan data dilakukan dengan: (a) Menyalin hasil wawancara sekomprensif mungkin yang didapatkan dari wawancara yang menggunakan audiotape ke dalam transkrip tulisan sehingga dapat dibaca; (b) Mencatat dokumentasi dan materi-materi dari para informan dan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian.

8. *Prosedur Analisa Data*

Prosedur analisa data dalam penelitian ini bersifat selektif (tidak semua data yang diperoleh dilaporkan/dijelaskan dalam penelitian) sejauh masih relevan dengan tema penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses analisa data dalam penelitian ini yaitu:

- Dalam analisa penelitian kualitatif ini, beberapa kegiatan yang menyita perhatian kami yaitu mengumpulkan informasi dari lapangan, menyortir informasi menjadi kelompok-kelompok, memformat informasi ke dalam sebuah cerita atau gambar, dan menuliskannya dalam naskah kualitatif;
- Kami akan mengambil informasi dan data dalam jumlah besar dan menguranginya hingga ke pola, pemetaan, kategori, atau tema tertentu dan kemudian menafsirkan informasi dan data tersebut dengan menggunakan sejumlah skema, diagram, tabel dan sebagainya sehingga menjadi lebih jelas;
- Setelah proses pengkategorian dan penafsiran data atau informasi yang diperoleh, kami akan melakukan identifikasi prosedur pengkodean yang akan digunakan untuk mengurangi informasi dan data sehingga menjadi tematik atau kategoris.

9. *Pembuktian*

Untuk memastikan keabsahan internal, strategi-strategi berikut ini akan kami lakukan:

- a) Triangulasi data: data dikumpulkan melalui sumber-sumber majemuk untuk memasukkan wawancara, pengamatan dan analisa dokumen;
- b) Pemeriksaan anggota: informan berperan sebagai pemeriksa sepanjang proses analisa. Dialog yang berkesinambungan menyangkut interpretasi

kami tentang realitas dan pihak-pihak lain di luar tim peneliti yang berkompeten memastikan kejujuran data;

- c) Pengamatan di lokasi penelitian: pengamatan tetap dan berulang terhadap fenomena dan latar serupa berlangsung di lokasi selama masa penelitian;
- d) Mode penelitian partisipatif: informan dilibatkan dalam sebagian besar tahap penelitian, dari pencarian data penelitian di lapangan hingga pemeriksaan penafsiran dan kesimpulan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Preview Pembahasan

Studi tentang kekerasan pada dasarnya melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial (interdisipliner). Beragam disiplin ilmu sosial sebenarnya relevan untuk menjelaskan fenomena kekerasan karena spiral kekerasan sangatlah terkait dengan beragam motivasi, variabel hingga teori-teori sosial. Kekerasan dapat maujud dengan bermacam bentuk dari ekonomi, sosial, agama, budaya, politik, militer hingga kehidupan privat sekalipun seperti relasi orang per orang atau dalam sebuah keluarga atau yang populer disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Spiral kekerasan itu pun bisa bermetamorfosis sedemikian halus atau kasar, lamban atau cepat, fisik atau non-fisik (simbolik). Namun diantara berbagai literatur yang mengkaji tema kekerasan, kebanyakan menghubungkan pada adanya muatan “dominasi” dalam hubungan antar manusia (Haryatmoko, 2010). Terkadang sebuah kekerasan sangatlah mudah diidentifikasi namun tak jarang juga kekerasan itu sangatlah sulit untuk dikenali.

Kekerasan yang bersifat simbolik akibat adanya dominasi wacana, budaya, agama dan stimulasi adalah bentuk kekerasan yang terkategori sulit untuk dikenali, bahkan ukuran-ukuran benar-salah dalam bentuk kekerasan itu seringkali dibuat tidak relevan lagi. Salah satu sasaran utama yang dibidik dari kekerasan itu adalah upaya untuk mencipta kepatuhan bagi korbannya sehingga, dalam taraf lebih jauh, si korban dengan suka rela menerima dan menyetujui hubungan dominatif yang bermuatan kekerasan itu, bahkan sampai melahirkan perasaan bersalah dalam diri korban apabila tidak mematuhi atau tidak menerima hubungan dominatif yang ditimpakan kepadanya (2010: x).

Kekerasan mahasiswa di Makassar yang telah berlangsung berulang kali tentunya tidak lepas dari adanya hubungan dominatif antara mahasiswa dengan pihak

lain atau diantara mahasiswa sendiri. Secara lebih spesifik, sub-bab ini membahas tentang bagaimana kekerasan mahasiswa di Makassar dijelaskan dari perspektif kultural-politik yang di dalamnya tentu mengandung relasi-relasi dominatif yang terselubung maupun tidak. Penelusuran kami melalui beberapa langkah riset mencapai identifikasi besar bahwa secara kultural, budaya masyarakat Makassar memang memiliki muatan kekerasan walau tidak secara keseluruhan. Secara sistematis, sub-bab ini ingin membahas mulai dari persoalan bagaimana telaah analitis kekerasan mahasiswa di Makassar itu dari perspektif kultural secara empiris kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara teoretikal-reflektif perihal kekerasan tersebut.

V.1. Hasil Penelitian

V.1.1. Sejarah

Sulawesi pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya sejak dulu mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan eksistensi masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan dan kejayaan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Ada tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Luwu (Abad X-XVI), Kerajaan Gowa (1528-1669), dan Kesultanan Bone (1666-1816). Kerajaan Luwu merupakan kerajaan tertua, terbesar dan terluas di Sulawesi Selatan. Wilayahnya meliputi Tana Luwu, Tana Toraja, Kolaka dan Poso. Luwu (Suku Luwu) merupakan suku bangsa yang besar yang terdiri dari 12 anak suku. Kerajaan Gowa atau Kerajaan Makasar didirikan oleh Suku Makasar. Sedangkan Kesultanan Bone atau Kesultanan Bugis yang memang didirikan oleh Suku Bugis.²

² Dalam hal sejarah kerajaan Gowa, khususnya pada masa Sultan Hasanuddin, hingga perlawanan terhadap VOC, terdapat sebuah buku klasik yang cukup representatif dan detail. Sebagian sub bab ini didasarkan pada buku tersebut (Sagimun, M.D., 1986).

Suku Bugis-Makassar merupakan suku bangsa utama yang mendiami Sulawesi Selatan, disamping suku-suku lainnya seperti Toraja dan Mandar. Suku Bugis mendiami Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Sidenreng-Rappang (sidrap), Pinrang, Polewali-Mamasa (Polmas), Enrekang, Luwu, Pare-Pare, Barru, Pangkajene-Kepulauan (Pangkep) dan Maros. Pangkep dan Maros merupakan daerah peralihan suku Bugis-Makassar.

Sedangkan Enrekang peralihan Bugis dengan Toraja sering dikenal sebagai orang-orang Duri atau Massenrempulu'. Suku Makassar mendiami Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar walaupun mempunyai dialek tersendiri. Berdasarkan rumpun bahasa daerahnya, maka di Sulawesi Selatan ini ada enam rumpun bahasa, seperti Bahasa Makassar, Bahasa Bugis, Bahasa Mandar, Bahasa Luwu, Bahasa Toraja, dan Bahasa Massenrempulu'. Rumpun bahasa Makassar meliputi daerah Gowa, Takalar, Jeneponto (Tauratea), Bantaeng, Selayar, Kanjang (Bulukumba), Manipi (Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai).

Rumpun bahasa Bugis meliputi daerah Sinjai, Bone, Wajo, Pinrang, Sidenreng-Rappang (Sidrap), Bulukumba, Pare-Pare, juga di sebagian daerah Pangkajene-Kepulauan (Pangkep), Maros, Mandar, Enrekang, Barru dan Palopo (Luwu). Rumpun Bahasa Mandar meliputi daerah Polmas, Majene dan sebagian daerah Pinrang. Rumpun bahasa Luwu meliputi daerah Luwu dimana sub-sub lokalnya punya bahasa sendiri-sendiri. Di daerah ini ada dua belas bahasa, seperti bahasa Bugis, bahasa Barru, bahasa Siko, bahasa Lubung, bahasa Wotu, bahasa Pajatabu, bahasa Mangkutana, bahasaSaroako, bahasa Paraso, bahasa Siwa, bahasa Toraja dan bahasa Pamuna. Bahasa Bugis digunakan oleh masyarakat dalam kota palopo (ibu kota Kabupaten Luwu) dan daerah pesisir pantai Wotu.

Sub-sub lokal bahasa dan karakteristik budaya di daerah ini menandai adanya sembilan anak-suku. Rumpun bahasa Toraja meliputi daerah Toraja, terutama Makale dan Rantepao, juga disebagian wilayah sub lokal Masamba

(di daerah Luwu). Rumpun bahasa Massenrempulu' meliputi daerah Massenrempulu', terutama Enrekang dan daerah-daerah sekitarnya yang diliputi gunung-gunung: Maspul (Massenrempulu'), yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Pinrang, Polewali-Mamasa (Polmas) dan Toraja. Dilihat dari segi penyebaran bahasa dan jumlah area masyarakat pemakainya, jelas di sini suku Bugis-Makassar merupakan suku-bangsa utama dan terbanyak yang mendiami daerah Sulawesi Selatan ini, di bawahnya Toraja dan menyusul Mandar.

Orang Bugis-Makassar dalam sejarahnya identik dengan ayam sebagai simbol keberanian atau kejantanan (*to-barani*), dalam bahasa Bugis *Manu'*, sedangkan dalam bahasa Makassar *Jangang*. Ayam merupakan hewan simbolis sekaligus pertarungan gengsi laki-laki. Raja Gowa XVI, I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin, digelari "*Haaantjes van het Oosten*" yang berarti "Ayam Jantan dari Timur" dan lambang Universitas Hasanudin. Masyarakat Bugis-Makassar selain menjadikan ayam sebagai ternak peliharaan juga menjadikannya sebagai hewan aduan.

Karena keakraban dengan ayam ini dengan senantiasa memperhatikan tanda-tanda fisik, bulu dan bunyi kokoknya, orang Bugis Makassar memiliki kepercayaan, firasat, alamat atau pertanda dari ayam ini : *pertama*, bila ayam betina berada di bawah kolong rumah, maka itu pertanda bahwa yang empunya rumah akan kedatangan tamu. *Kedua*, bila ayam betina berkotek di waktu malam, maka itu pertanda akan ada kerabat yang akan meninggal. Ayam ini disebut "Manu' patulata" dan karenanya harus disembelih, tidak boleh dibiarkan bertelur karena dapat membawa sial atau celaka. *Ketiga*, bila ayam memakai jambul (*simpolong*), maka itu pertanda ayam tersebut tidak baik dipelihara karena bisa membawa sial. *Keempat*, bila ayam berbulu kelabu (*kawu*) maka ayam tersebut juga tidak baik untuk dipelihara karena dianggap *sorokau* (ayam pembawa sial), dan *Kelima*, bila ayam jantan berkokok seperti menyuarakan 'pelihara aku' (*makkau*) maka ayam tersebut baik untuk dipelihara karena dianggap pembawa rezeki.

Dalam kitab *La Galigo* diceritakan bahwa tokoh utama dalam epik mitik itu, *Sawerigading*, kesukannya menyabung ayam. Dahulu, orang tidak disebut pemberani (*to-barani*) jika tidak memiliki kebiasaan minum arak (*angnginung ballo*), judi (*abbotoro*), dan *massaung manu'* (adu ayam), dan untuk menyatakan keberanian orang itu, biasanya dibandingkan atau diasosiasikan dengan ayam jantan paling berani di kampungnya (di negerinya), seperti *Buleng-Bulengna Mangasa*, *Korona Mannongkoki*, *Barumbunna Pa'la'lakkang*, *Buluarana Teko*, *Campagana Ilagaruda (Galesong)*, *Bakka Lolona Sawitto* dan lain sebagainya. Dan hal sangat penting yang belum banyak diungkap dalam buku sejarah adalah fakta bahwa awal konflik dan perang antara dua negara adikuasa, penguasa semenanjung barat dan timur jazirah Sulawesi Selatan, Kerajaan Gowa dan Bone diawali dengan "Massaung Manu'". (Manu Bakkana Bone melawan Jangang Ejana Gowa).

Pada tahun 1562, *Raja Gowa X, I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng* (1548 – 1565) mengadakan kunjungan resmi ke Kerajaan Bone dan disambut sebagai tamu negara. Kedatangan tamu negara tersebut dimeriahkan dengan acara *massaung manu'*. Oleh Raja Gowa, Daeng Bonto mengajak Raja Bone *La Tenrirawe Bongkange'* bertaruh dalam sabung ayam tersebut. Taruhan Raja Gowa 100 katie emas, sedang Raja Bone sendiri mempertaruhkan segenap orang *Panyula* (satu kampung). Sabung ayam antara dua raja penguasa semenanjung Timur dan Barat ini bukanlah sabung ayam biasa, melainkan pertandingan kesaktian dan kharisma. Hasilnya ayam sabungan Gowa yang berwarna merah (Jangang Ejana Gowa) mati terbunuh oleh ayam sabungan Bone (Manu Bakkana Bone).

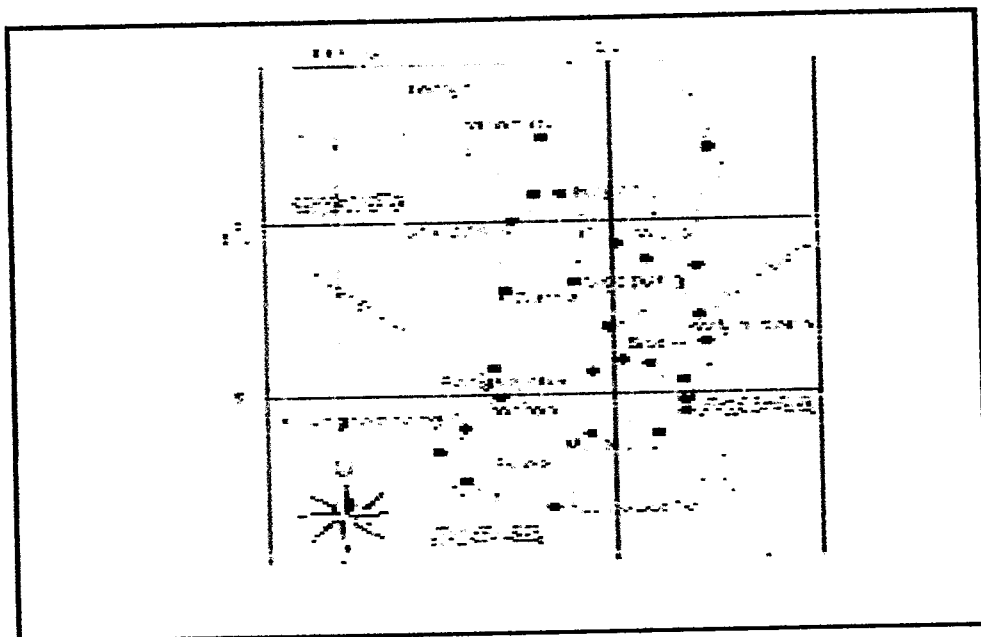
Kematian ayam sabungan Raja Gowa merupakan fenomena kekalahan kesaktian dan kharisma Raja Gowa oleh Raja Bone, sehingga Raja Gowa *Daeng Bonto* merasa terpukul dan malu. Tragedi ini dipandang sebagai peristiwa *siri'* oleh Kerajaan Gowa. Di lain pihak, kemenangan Manu Bakkana Bone menempatkan Kerajaan Bone dalam posisi psikologis yang kuat terhadap kerajaan-kerajaan kecil

yang terletak di sekitarnya. Dampak positifnya, tidak lama sesudah peristiwa sabung ayam tersebut serta merta kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Kerajaan Bone menyatakan diri bergabung dengan atau tanpa tekanan militer, seperti Ajang Ale, Awo, Teko, serta negeri Tellu Limpoe.

Peristiwa itu menunjukkan betapa besar pengaruh psikologis '*Massaung Mamu*' tersebut sehingga menjadi pangkal konflik dan perang Kerajaan Bone melawan Kerajaan Gowa. Bergabungnya Tellu Limpoe menjadi Wanua Palili Bone yang sebelumnya berstatus Wanua Palili Kerajaan Gowa dijadikan dalih oleh Gowa untuk melancarkan serangan militer pertama ke Bone dalam tahun 1562. Tahun berikutnya, serangan militer kedua menyusul dengan jumlah pasukan yang lebih besar, Serangan militer ketiga dan keempat dilancarkan lagi dalam tahun 1565. *Raja Gowa XI, I Tajibarani Daeng Marumpa Karaeng Data Tunibata* yang hanya naik takhta selama 20 hari ini tewas dalam peperangan ini. Dalam setiap serangan militer Kerajaan Gowa terhadap Kerajaan Bone, Kerajaan Gowa tidak pernah menaklukkan betul Kerajaan Bone sehingga selalu diakhiri dengan perjanjian Perdamaian, namun Kerajaan Gowa selalu mengingkari perjanjian itu dan tetap menunggu kesempatan yang baik untuk menaklukkan Kerajaan Bone. Dalam tahun 1575, dilancarkanlah serangan militer kelima sampai akhirnya Bone benar-benar dikalahkan dan ditaklukkan dimasa pemerintahan Raja Gowa I *Mangerangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna* dalam tahun 1611.

Sejarah konflik dan Perang Gowa melawan Bone ini menarik dicermati karena diakhir penaklukan Bone oleh Gowa, alasan perang yang dipakai Sultan Alauddin adalah alasan "Bundu Kasallangan" atau "Musu Sellenge", yaitu memerangi suatu kerajaan supaya masuk Islam. Sementara dalam istana Bone, beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Gowa merupakan satu pelanggaran kedaulatan negara atas negara lain sehingga setiap peperangan harus dibalas dengan peperangan. Di belakang hari, sebab inilah yang memicu kebangkitan semangat *Arung Palakka* untuk memerdekakan Bone (Negeri Bugis) atas penjajahan

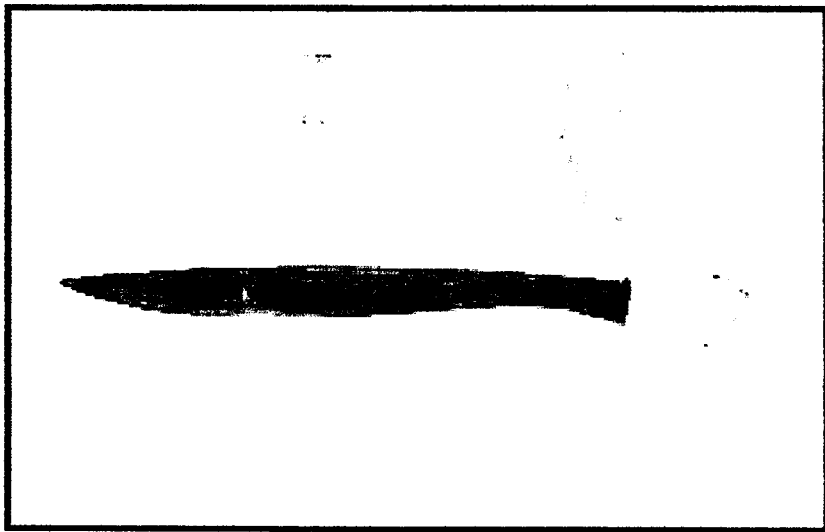
Gowa, terlebih lagi setelah pengerahan sekitar 40.000 tenaga kerja paksa orang Bone–Soppeng membangun Benteng–Benteng Makassar. (Makkulau, 2008).



Gambar. 1. Peta Kerajaan Gowa dan Bone

Ada dua tokoh sentral dari Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone yang keduanya dijadikan patron bagi sukunya masing-masing. Kerajaan Gowa mempunyai tokoh besar Sultan Hasanudin sedangkan Kerajaan Bone memiliki Aru Palaka. Konflik antar kedua kerajaan yang bermula dari kekalahan adu ayam antara Raja Gowa X, I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (1548-1565) dengan Raja Bone La Tenrirawe Bongkange'. Konflik kedua kerajaan ini terus berlanjut sampai generasi selanjutnya. Kerajaan Gowa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanudin menyerang Kerajaan Bone dengan alasan penyebaran ajaran Islam. Begitu pula sebaliknya, bahkan Kerajaan Bone di bawah kepemimpinan Aru Palaka

kerjasama dengan Belanda untuk menyerang Kerajaan Gowa, karena tidak mau menyerah ke Belanda.



Gambar.2. Senjata Tradisional Masyarakat Bugis-Makassar (Badik)

Dalam perkembangan zaman selanjutnya, konflik dua kerajaan ini selalu direproduksi oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Konflik ini kemudian menjadi semacam memori masa lalu yang selalu dan senantiasa “belum selesai”. Konflik di masyarakat, bahkan khususnya yang melibatkan mahasiswa, terjadi diantaranya juga karena adanya sentimen organisasi daerah (Organda) yang berasal dari beberapa daerah yang dulunya pernah berkonflik. Mereka mereproduksi identitas kolektif kesukuan mereka sekaligus memori-memori kolektif masa lalu yang belum selesai tersebut. Suku-suku yang sering terlibat konflik seperti Luwu, Bone, Jeneponto. Bentrok atau tawuran antar suku juga terjadi di Selatan Kota Makasar. Suku-suku yang berkonflik seperti Luwu vs Bone, Makasar vs Luwu, Jeneponto vs Bone. Kekerasan yang terus selalu tereproduksi ini dipengaruhi juga oleh lambang

daerah-daerah yang menyimbolkan kekerasan dengan menyertakan gambar “Badik” (senjata tajam khas Makassar). Sampai sekarang pun masyarakat Makassar masih ada yang selalu membawa Badik saat berpergian.

Filosofi masyarakat Bugis yang bisa membangun *esprit de corps* dan identitas kolektif seperti *Mali siparappe* (hanyut saling menyelamatkan), *Rebba sipatokkong* (tumbang saling menegakkan), *Malelu Sipakainge* (terlupa saling mengingatkan), *taro ada taro gau* (berjanji sama menunaikan), *fada idi fada elo* (jalin tekad dalam kebersamaan).

V.1.2. Sikap Mental Orang Bugis-Makassar

Seperti yang dijelaskan dalam buku Lontara masyarakat Bugis-Makassar mempunyai falsafah hidup. *Pertama, Aja mupakasiriwi, materi-tu.* Jangan dipermalukan dia, sebab dia akan memilih lebih baik mati daripada dipermalukan. *Kedua, Ajamullebbaiwi, nabokoiko-tu.* Jangan kecewakan dia, sebab jika dikecewakan pasti meninggalkan anda. Masyarakat Bugis-Makassar untuk menjaga harga dirinya supaya tidak dipermalukan untuk mempertahankannya akan mempertaruhkan harta bendanya. *“Iamua narisappa warangparange, nasaba rialai pallawasirik. Narekko sirik Ba’na Lao, sungenatu naranreng.”*

Sesungguhnya harta benda sengaja dicari dan disediakan untuk menutup malu. Jika kita dipermalukan, maka harta tak ada gunanya lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa orang Bugis-Makassar memang sangat menjaga harga dirinya. Harga diri merupakan cerminan dari martabat dan jika harga dirinya terusik maka akan mempertahankannya dengan segala cara terutama dengan mempertaruhkan harta bendanya.

Sikap mental demikian inilah yang menjadi salah satu akar superioritas kolektif yang potensial menyulut kekerasan apabila terjadi sesuatu hal yang mengancam harga diri dan kepercayaan masyarakat

Bugis-Makassar. Sikap mental demikian secara eksklusif direproduksi sedemikian rupa sehingga dalam taraf lebih jauh menjadi membatin dalam alam bawah sadar masyarakat Bugis-Makassar.

V.1.3. Konsep *Siri'*

Masyarakat Bugis mempunyai ajaran atau falsafah hidup untuk lebih baik atau memposisikan diri lebih di atas terhadap sesamanya (masyarakat lain) melalui konsep *Siri'*. *Siri'* merupakan konsep keperibadian yang menjadi falsafah hidup masyarakat Bugis. *Siri' na pesse* dijadikan hukum kehidupan. Jika seseorang tidak lagi memiliki *siri'* maka dapat dinilai individu itu tidak lagi memiliki kepribadian dan bermakna mati dalam aspek psikologis. Seperti yang terdapat dalam ungkapan "*siri' mi tu narituo*" (karena malu kita hidup). Malu menjadi miskin, malu menjadi seorang yang tidak taat pada *sara'* (aturan agama). "*Masiri' tuo mappale*" (malu hidup menadahkan tangan) menjadi falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis. Singkatnya, *siri'* merupakan sebuah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia atau rasa dendam dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerangka kemuliaan dan pemulihan harga diri yang disesuaikan dengan norma-norma atau aturan adat dan *sara'* (hukum Islam) yang berlaku.

Seseorang akan merasa malu jika tidak dapat menempatkan diri dalam kondisi hidup yang layak. Hidup layak dalam makna pengakuan terhadap eksistensi diri sebagai pribadi yang bermartabat.³ Ketika seseorang bersilaturahmi kepada orang yang lain, ketika seorang bershalawat kepada Nabi atau ketika seseorang sedang melaksanakan shalat, demikian juga ketika seseorang sedang bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang tersebut sedang dalam proses

³ Dampak negatif dari masyarakat cenderung "*show off*" atas harta yang dimilikinya supaya dianggap sebagai orang yang bermartabat. Sebagai contoh selalu memakai semua perhiasannya ketika ada undangan perkawinan atau acara-acara resmi lainnya.

menjaga interaksi atau *siri'*-nya. Seseorang yang bermasalah dengan urusan silaturahmi, shalawatnya atau shalatnya, dan pekerjaannya, tentulah merupakan orang-orang yang juga bermasalah dalam urusan rasa malu atau *siri'*-nya.

Siri' juga berkaitan dengan *reso* atau kerja keras yang dilakukan dengan niat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang akan hidup mulia dengan bekerja keras dan giat dalam mewujudkan apa yang menjadi impian yang harus dicapai. Seseorang akan "*masiri tuo mappale*" (malu hidup menadahkan tangan) jika seseorang tidak mau dan tidak bisa '*mareso massapa dallek*' (bekerja keras mencari rezeki). Lazimnya, masyarakat Bugis sangat menyenangi hidup dengan etos kerja yang tinggi. Disiplin dan tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal negative yang dapat mengurangi aktifitasnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Masyarakat Bugis perantau, *siri'* tetap menjadi bagian hidup mereka. Meskipun kondisi ini lebih diwarisi sebagai keteladanan yang disaksikan generasi demi generasi. Penjabaran falsafah *siri'* pada kenyataannya sudah mengalami degradasi. Sehingga sering kali *siri'* dimaknai sebagai upaya balas dendam jika terdapat pihak tertentu yang dirasakan menyinggung perasaan. Aksi seperti ini bisa saja disebut sebagai bentuk perwujudan rasa siri' namun sayangnya tidak jarang rasa *siri'* itu juga dipicu oleh pihak lain yang "*de' ga sirina*" (tidak memiliki rasa malu). Jika seseorang memiliki sesuatu niat atau tujuan yang tidak baik, maka dalam konteks *siri'*, orang tersebut sebenarnya sudah mati atau tetap hidup namun "*tuo fappadai olo' kolo'e*" (hidup sama dengan binatang).

Hal inilah sebenarnya yang dinilai penting untuk dipahami bersama, karena *siri'* dalam berbagai dimensi pemaknaannya akan menjadikan seseorang berusaha hidup dengan memiliki martabat diri. Bekerja keras untuk tidak menjadi orang yang memiliki rasa malu (*masiri'*) dan kreatif dalam bekerja demi mewujudkan '*masiri narekko tuo mappale*' (malu jika hidup menjadi beban orang lain).

V.1.4. Falsafah Tiga Ujung

Masyarakat Bugis-Makassar, di samping memiliki simbol-simbol budaya yang telah dijelaskan di atas, juga memiliki falsafah hidup yang diinternalisasi sedemikian rupa sehingga menjadi semacam ajaran untuk meraih kehidupan yang baik. Falsafah hidup ini tertuang dalam “Falsafah Tiga Ujung (*Tallu Cappa*)”, sekaligus maknanya, yaitu:

1. Ujung Lidah (*Cappa Lila*)

Dalam menyelesaikan masalah harus dengan jalan diplomasi atau pembicaraan terlebih dahulu. Ujung lidah ini juga bisa diartikan kecerdasan dalam segala hal, seperti kemampuan membedakan baik dan buruk. Di samping itu, masyarakat Bugis-Makassar memiliki tujuan hidup untuk meraih kecerdasan dengan menimba ilmu dengan baik sehingga mampu menghasilkan pendapat-pendapat yang baik.

2. Ujung Kemaluan (*Cappa Buto*)

Bila cara pertama gagal, maka bisa dilakukan dengan mengadakan perkawinan antara kedua belah pihak yang bertikai. Tujuan dari perkawinan ini diharapkan bisa menjalin kekerabatan yang lebih. Selain itu *Coppa Buto* bisa dimaknai bahwa untuk meraih kehormatan hidup, apabila tidak mampu meraihnya dengan cara *Coppa Lila* hendaknya menggunakan cara *Coppa Buto* ini, yakni mencari pasangan hidup dari keluarga terhormat dan/atau kaya.

3. Ujung Badik (*Cappa Badik*)

Apabila kedua cara di atas gagal, maka cara terakhir adalah dengan peperangan untuk mempertahankan harga diri dan menunjukkan keberanian. *Coppa Badik* juga bisa dimaknai dengan ajaran untuk meraih kehormatan hidup dengan menggunakan cara kekerasan (secara paksa)

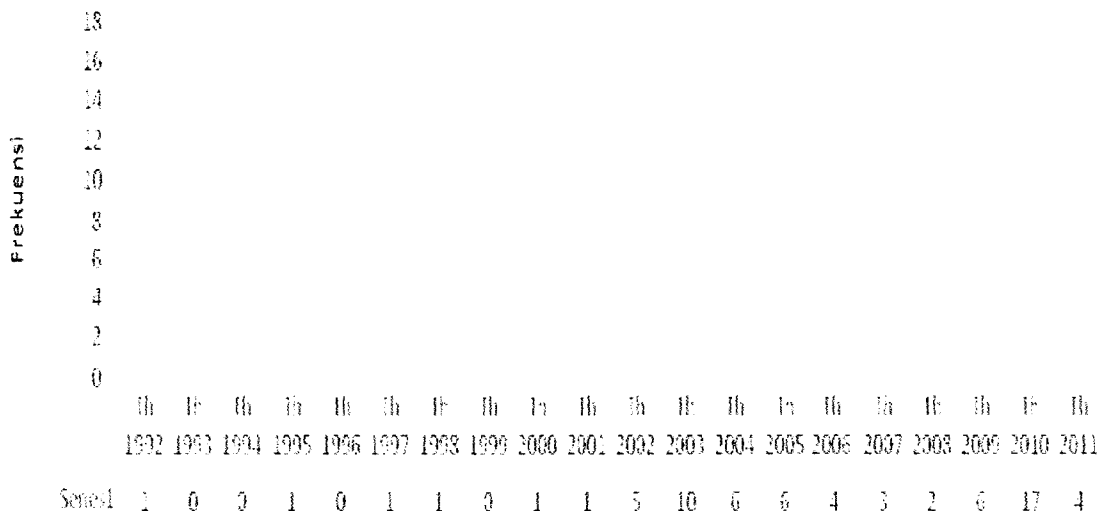
apabila memang cara pertama dan kedua di atas tidak mampu untuk dilakukan. Filosofi *Coppa Badik* inilah yang dalam perkembangan zaman (kini) menjadi alasan pembenar bagi berlangsungnya kekerasan baik di masyarakat Bugis-Makassar secara umum maupun mahasiswa khususnya.

V.2. PEMBAHASAN

V.2.1. Identifikasi dan Motif Kekerasan Mahasiswa

Kekerasan yang terjadi di kalangan mahasiswa dalam sepuluh tahun terakhir memperlihatkan grafik yang tidak selalu naik, melainkan intensitasnya cenderung naik-turun. Namun demikian, dari data yang tercatat, tahun 2010 merupakan puncak terbesar intensitas kekerasan mahasiswa yang terjadi di Makassar dengan jumlah kekerasan selama sepuluh tahun terakhir sebesar 69 kali.

Grafik 1 . Jumlah Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar



Kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa Makassar bisa dipetakan dari sudut pandang aktor yang terlibat. Kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa

Makassar selain melibatkan mahasiswa sendiri, juga melibatkan masyarakat umum yang berbasis kesukuan. Aktor-aktor yang terlibat diantaranya:

1. Antar Mahasiswa: Identitas Kolektif yang Mengemuka

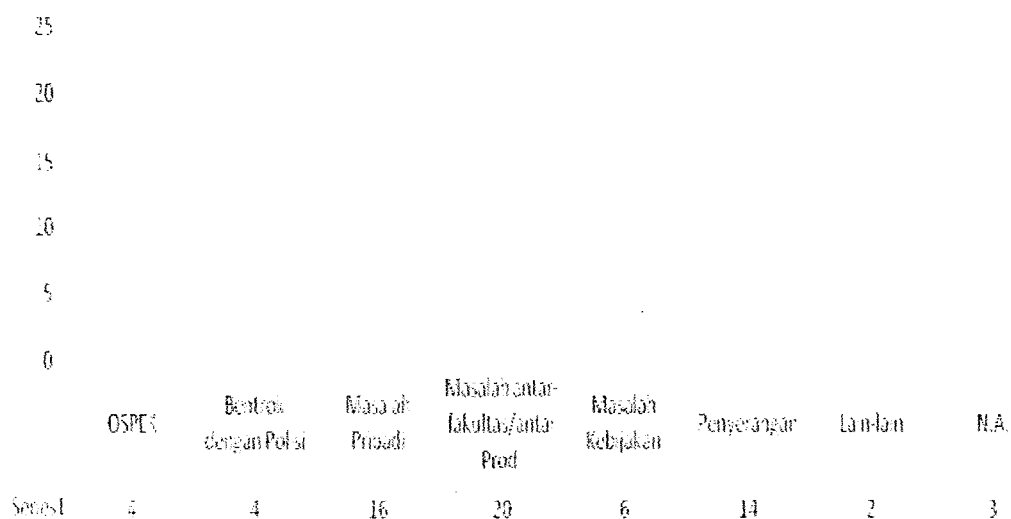
Kekerasan yang dilakukan antar mahasiswa biasanya terjadi antar fakultas. Setidaknya ada empat universitas di Makassar yang sering terjadi tawuran seperti Universitas Hasanudin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Makassar, Universitas Muslim 45.

Fakultas di Universitas Hasanudin yang sering tawuran diantaranya Fakultas Teknik (FT) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Teknik dengan FMIPA, Fakultas Teknik dengan beberapa fakultas di UNHAS. Dalam sejarahnya, Fakultas Teknik di UNHAS cenderung menjadi *common enemy* oleh fakultas-fakultas lain. Hal ini dikarenakan Fakultas Teknik dinilai oleh fakultas-fakultas lain memiliki *esprit de corps* yang berlebih, bahkan Fakultas Teknik khususnya jurusan Geologi setiap sore selalu lari-lari mengelilingi kampus dan selalu membawa scarf orange di saku belakang. Identifikasi diri ini yang membuat fakultas lain lebih memandang Fakultas Teknik lebih eksklusif. Apalagi ada anggapan bahwa Fakultas Teknik menilai di UNHAS itu hanya ada tiga fakultas, (1) Fakultas Teknik, (2) Fakultas Pascasarjana, (3) fakultas lain.

Tawuran mahasiswa di UNHAS sangat didasari karena adanya sentimen fakultas, khususnya terhadap Fakultas Teknik tersebut, seperti FISIP dengan Fakultas Teknik, Fakultas Teknik dengan Fakultas MIPA, Fakultas Teknik dengan beberapa fakultas lainnya. Sederhananya, Fakultas Teknik menjadi musuh bersama. Alasan mahasiswa tawuran itu terlebih karena: *pertama*, sentimen fakultas sebagaimana telah dibahas di atas. *Kedua*, solidaritas individu kepada identitas kolektif. Alasan kedua ini biasanya mengiringi tawuran antar fakultas di atas. Seorang mahasiswa non-Teknik, misalnya, diserang oleh mahasiswa Fakultas Teknik, padahal sejatinya alasan penyerangan itu hanya persoalan sepele seperti rebutan pacar, maka hal ini sangat

potensial memicu tawuran diantara satu kelompok dengan kelompok lain (terkadang merembet menjadi sentimen fakultas). Begitupun sebaliknya, apabila ada seorang mahasiswa Fakultas Teknik yang diserang oleh mahasiswa fakultas non-Teknik. Dengan kata lain, terkadang sentimen individual dapat menyulut terjadinya kekerasan antar kelompok mahasiswa karena adanya solidaritas pertemanan diantara mereka.

Pemicu Kekerasan



Ketiga, adanya keinginan mahasiswa untuk merubah atau mengkritik fasilitas kampus yang dianggap sudah tidak bagus dan harus diganti (renovasi). *Keempat*, keinginan atau idealisme untuk merubah tatanan sosial. Mahasiswa Geologi memiliki simbol scraf ditaruh kantung belakang dan dikeluarkan sedikit. Mereka setiap sore seringkali mengadakan lari-lari (*joging*) mengelilingi kampus, alasannya karena jurusannya menuntut fisik yang kuat. Di samping itu, motto Fakultas Teknik adalah “we are the champions” dan menilai di UNHAS ini cuma ada tiga fakultas, fakultas teknik, fakultas pascasarjana dan fakultas lain.⁴

⁴ Wawancara dengan Pak Ramli Dosen Sosiologi, UNHAS pada tanggal 20 Juli 2011 di Kampus UNHAS, pukul 10.00 WITA.

Fakultas di Universitas Negeri Makassar yang sering bentrok seperti Fakultas Teknik dengan Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik dengan HMJ Geografi, Fakultas Teknik dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan.

Sedangkan di Universitas 45, Fakultas Teknik bentrok dengan kelompok mahasiswa karena kesalahpahaman, dan tawuran antar mahasiswa teknik yaitu jurusan Planologi dengan jurusan teknik lainnya yang dipicu oleh pemukulan. Universitas lainnya yang sering terjadi tawuran mahasiswa yaitu Universitas Muslim Indonesia anantara Fakultas Teknik dengan MAPALA, dan tawuran antar mahasiswa.⁵

Kekerasan yang terjadi di Universitas terbagi menjadi dua: (1) mahasiswa *vis a vis* dengan sesama mahasiswa (2) mahasiswa *vis a vis* dengan pihak kampus (rektorat). Motif kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa kategori pertama karena solidaritas kelompok. Awalnya memang sering konflik antar fakultas itu dipicu oleh hal yang sepele seperti karena tersinggung, ceweknya diganggu, atau karena tiba-tiba ada mahasiswa salah satu fakultas yang menjadi korban pemukulan. Akhirnya kerusuhan itu meluas menjadi tawuran antar fakultas. Fakultas yang merasa sebagai korban penyerangan dari fakultas lain akhirnya mau tidak mau harus mempertahankan kampusnya sehingga bentrokan tidak terhindarkan lagi. Kuatnya identitas kelompok mahasiswa Makassar ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai falsafah orang Bugis-Makassar salah satunya seperti *fada idi fada elo* (jalin tekad dalam kebersamaan).

Nilai-nilai inilah yang membuat masyarakat Makassar mempunyai nilai kebersamaan yang kuat sehingga walaupun bukan saudara ketika temannya diserang oleh kelompok lain maka secara otomatis akan membelanya terlepas benar atau salah. Dalam sebuah wawancara dengan Pembantu Dekan III Universitas Negeri Makassar, Dr. Jumadi, diilustrasikan bahwa perasaan solidaritas yang sangat kuat itu bahkan seringkali melampaui ikatan pertemanan dalam kehidupan di luar kampus, di kos

⁵ Diambil dari Disertasi Jumadi di Universitas Hasanudin (2009) yang berjudul "TAWURAN MAHASISWA (Studi Dinamika Konflik Sosial di Makassar).

misalnya. Seorang mahasiswa bisa jadi terlibat tawuran berhadapan dengan teman satu kosnya ketika di kampus namun mereka akan kembali berteman lagi ketika kembali ke rumah kos.

“...Coba bayangkan, katakanlah ini fakultas teknik dan saya yang fakultas bahasa, saya kos, ini kan ada kawasan kos mengelilingi kampus, saya sih kos, ini teknik, ini bahasa. Tiap hari saya sama makan sama-sama, tidur di kos sama tapi kan tiap pagi, katakanlah tawurannya saya bilang jam berapa terjadi. Tindakan kekerasan, saya bilang konflik, itu ada waktunya, dari jam sekian sampai jam sekian, kalau dihitung bulannya berapa saya tidak kasih liat, semua sampai ke Indonesia semua, pagi saya masih sempat sarapan pagi-pagi. Kuliah ya kuliah, saya ya punya jalan ya untuk masuk dibahasa lewat trowongan ini untuk masuk ke teknik lewat trowongan ini siang meletus tahu *nggak??* ada pakek helm ada yang pakek ini. Ndak sebentar kalau sudah magrib atau tengah malam kekosnya, kita hampir *kenak* ya...”⁶

Solidaritas yang unik tersebut memang sangat bertalian dengan konstruksi kultural yang membingkai nalar kekerasan terlebih sebagai urusan kolektif ketimbang individu. Artinya, seorang individu akan lebih mengutamakan identitas kolektifnya sehingga harus bertawuran dengan teman kosnya sendiri daripada ia harus menanggung malu atau dianggap tidak punya solidaritas kolektif. Sebagaimana filosofi masyarakat Bugis-Makassar dalam membangun *esprit de corps* dan identitas kolektif seperti *Mali siparappe* (hanyut saling menyelamatkan), *Rebba sipatokkong* (tumbang saling menegakkan), *Malelu Sipakainge* (terlupa saling mengingatkan), *taro ada taro gau* (berjanji sama menunaikan), *fada idi fada elo* (jalin tekad dalam kebersamaan). Filosofi semacam ini, dalam praktiknya cenderung hanya dipahami sebagai pembelaan kepada identitas kolektif, terlepas benar atau salah yang dibela itu.

⁶ Wawancara dengan Pak Jumadi, Pembantu Dekan III, FIS, Universitas Negeri Makassar, pada tanggal 20 Juli 2011 di Kampus UNHAS, pukul 13.00 WITA.

Dalam taraf lebih jauh, pengaruh konstruksi kultural terhadap nalar kekerasan yang sering muncul diceritakan oleh seorang dosen Sosiologi, Universitas Hasanuddin (UNHAS). Ia menelusuri bahwa tradisi perang antar suku memang sangat kuat dalam masyarakat Makassar.

“Dulu waktu saya masih kuliah atau sekolah, saya sering, terutama pada saat puasa (bulan Ramadhan), *ngabuburit* ke desa-desa tetangga untuk mencari-cari dan menonton perang antar desa atau antar suku. Biasanya perang itu terjadi menjelang maghrib atau sesudah subuh. Jadi kita menonton orang-orang itu lempar-lempar panah, bawa parang dan senjata-senjata lain. Tentu dari kejauhan ya...”⁷

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa tradisi gemar berperang antar desa atau antar suku tersebut sangat mungkin berlanjut ke dalam kehidupan kampus, khususnya di kalangan mahasiswa. Dalam suatu waktu, misalnya, ia menceritakan, seorang mahasiswa, biasanya yang sudah senior, terkadang memang sengaja melempar provokasi untuk mengadakan tawuran kepada temannya karena sudah terlalu lama tidak ada ribut-ribut tawuran. Dalam kondisi semacam ini, suatu masalah cenderung dimunculkan untuk memancing emosi kolektif hingga terjadi tawuran antar mahasiswa. Artinya, persoalan tawuran dan kekerasan mahasiswa dalam taraf tertentu, berdasar cerita itu, sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masa lalu seperti semacam *habitus* – meminjam istilah Bourdieu – kekerasan yang sudah terkonstruksi sedemikian rupa hingga membentuk praktik sosial berupa tawuran dan kekerasan.

2. Mahasiswa-Polisi: Upaya Pengekspresian Aspirasi

⁷ Wawancara dengan Bapak Ramli, Dosen Sosiologi UNHAS pada tanggal 20 Juli 2011, pukul 10.00 di Kampus UNHAS.

Kekerasan mahasiswa makassar juga melibatkan mahasiswa dengan polisi. Antara mahasiswa dan polisi keduanya saling memandang satu sama lain sebagai pihak yang berseberangan. Disatu sisi mahasiswa merasa polisi cenderung menghalang-halangi setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sisi lain polisi menilai mahasiswa dalam melakukan setiap demonstrasi selalu menggunakan cara-cara kekerasan (pembakaran ban bekas, mendobrak pagar) atau diakhiri dengan cara-cara yang kurang simpatik juga seperti tawuran atau aksi lempar batu dengan polisi. Polisi juga punya anggapan bahwa dimanapun terjadi kriminalitas atau kekerasan, maka polisi memiliki kewenangan untuk mengintervensi, sekalipun harus masuk ke wilayah kampus.

“.....Polisi sering masuk kampus, *show of force* dengan kendaraan perintisnya. Kekerasan mahasiswa itu ada kalanya merupakan produk settingan mahasiswa. Ketika Kapolda kinerjanya buruk, maka mahasiswa melakukan demonstrasi yang diakhiri dengan kekerasan dan pengrusakan akhirnya Kapolda diganti.”⁸

“.....Kekerasan mahasiswa di Makassar ada kalanya itu pesanan dari elit di Jakarta karena pertarungan elit dengan memanfaatkan mahasiswa untuk menyikapi isu-isu nasional, dan tidak jarang aksi demonstrasi mahasiswa diakhiri dengan bentrokan supaya masuk media dan pesannya sampai ke Jakarta. Polisi sering menemukan bom molotov yang telah disiapkan sebelum aksi demonstrasi.”⁹

Motif kekerasan yang terjadi antara mahasiswa dengan aparat yaitu *pertama*, kekerasan pada waktu demonstrasi disebabkan oleh provokasi polisi. Hal ini dilakukan supaya pihak polisi bisa segera membubarkan demosntrasi mahasiswa. Terjadinya bentrok sebagai legitimasi polisi dalam menertibkan aksi

⁸ Wawancara dengan Bapak Ramli, Dosen Sosiologi UNHAS pada tanggal 20 Juli 2011, pukul 10.00 di Kampus UNHAS.

⁹ Pernyataan Pak Siswa (Staf Humas Polda Sulawesi Selatan) di FGD pada tanggal 21 Juli 2011, pukul 11.00 WITA.

demonstrasi mahasiswa. *Kedua*, demonstrasi mahasiswa merupakan suatu upaya untuk melakukan kritik atas buruknya kinerja Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Tujuan dari demonstrasi yang disertai dengan kerusuhan ini supaya Kapolda kerjanya dinilai buruk dan akan diganti. Hal ini terbukti efektif, beberapa Kapolda diganti setelah ada demonstrasi mahasiswa yang disertai dengan kekerasan. Makassar merupakan daerah yang sering terjadi pergantian Kapolda.

3. Mahasiswa-Pemerintah: Komodifikasi Kekerasan

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa juga ditujukan kepada pemerintah yang berkuasa. Dalam melakukan aksi demonstrasinya mahasiswa selalu ingin langsung menyampaikan aspirasinya langsung kepada Walikota atau Gubernur. Namun ketika mahasiswa tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung maka mahasiswa sebagian besar selalu mengakhiri aksinya dengan bentrok. Bahkan di Makassar sering aksi demonstrasi walaupun hanya dilakukan oleh beberapa orang mahasiswa namun selalu menggunakan instrumen pembakaran ban bekas atau menutup jalan utama yang akhirnya mengakibatkan kemacetan.

“ada juga mahasiswa yang cuma tiga sampai empat orang demo tp sdh menutup jalan. Apalagi disertai dengan pembakaran ban bekas sehingga membuat macet jalan. Dulu orang bilang jangan kayak orang becak tp sekarang orang bilang jangan kayak mahasiswa kalau demo memacetkan jalan.”¹⁰

Pak Ramli juga menambahkan bahwa dikalangan mahasiswa sendiri setiap melakukan aksi demo dan tawuran selalu ada salah satu aktor yang sangat berani dalam setiap aksinya dan cenderung kepada tindak kekerasan. Mereka bertindak berani memang di daerah asalnya seorang jawara. Namun dengan bertindak seperti

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ramli, Dosen Sosiologi UNHAS pada tanggal 20 Juli 2011, pukul 10.00 di Kampus UNHAS.

itu pemerintah akhirnya “memelihara” bahkan tidak jarang memberikan sebuah jabatan.

“Ada mahasiswa yang biasa disebut jawara, dan dia selalu tampil di depan ketika melakukan aksi demonstrasi. Jawara ini mempunyai “klik” dengan penguasa. Ada yang lulusnya lama waktu kuliah tapi ketika lulus kembali ke daerahnya dan mereka banyak yang jadi pejabat.”

Sebagian mahasiswa memang melakukan aksi demonstrasi yang disertai dengan kekerasan supaya mendapatkan perhatian pemerintah dan bahkan untuk menguatkan *bargaining position* dengan pemerintah maupun pihak-pihak yang di demo. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.

“Mahasiswa melakukan aksi demo itu merupakan sebuah pencarian ruang aktualisasi diri. Dengan seperti itu mereka menemukan dan membentuk jati dirinya. O,..ada bahkan ada yang untuk mencari keuntungan pribadi atau mencari jejaring dengan elit politik. Ada mahasiswa yang mendemo THM (Tempat Hiburan Malam) lalu namanya dicatat dan akhirnya besoknya mereka masuk tanpa bayar.”

11

Motif mahasiswa melakukan demonstrasi dengan pihak pemerintah selain memang murni melakukan kritik terhadap pemerintah atas setiap kebijakan yang diambil. Motif lainnya dengan mahasiswa melakukan demonstrasi yang diakhiri dengan bentrok karena keinginan mahasiswa tersebut mempunyai *bargaining* dengan elit penguasa, sehingga baik secara individu maupun kelompok mereka mempunyai “klik” dengan elit.penguasa. Relasi antara mahasiswa dengan elit penguasa selalu dipertahankan bahkan sampai mahasiswa lulus. Dengan memelihara relasi dengan

¹¹Wawancara dengan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin pukul 22.30 WITA di Kantor Nasional Demokrat pada tanggal 21 Juli 2011.

elit penguasa mahasiswa tidak jarang memperoleh jabatan struktural formal maupun informal yang masih dilingkarkan kekuasaan elit penguasa.¹² Sederhananya, kekerasan dalam hubungannya dengan pemerintah, selain bertujuan untuk ekspresi atas aspirasi mahasiswa, juga potensial digunakan untuk alat tawar untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu yang cenderung bersifat material, umumnya posisi atau jabatan tertentu. Kekerasan mahasiswa dalam hal ini dikomodifikasikan untuk tujuan-tujuan pragmatis politik, yakni meraih posisi atau jabatan tertentu oleh mahasiswa dari pemerintah (penguasa).

4. Antar organisasi daerah (organda)

Mahasiswa juga terkadang terlibat dengan masyarakat bentrok dengan kelompok masyarakat lainnya karena sentimen kesukuan atau yang biasa disebut dengan Organisasi Daerah (Organda). Di Makassar sentimen kesukuan ini memang masih kuat dan selalu direproduksi terus menerus oleh generasi-generasi selanjutnya. Di Makassar memang terdiri banyak suku, dan suku yang dominan seperti Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Luwu. Ketiganya ini yang sering bentrok satu sama lain. Seperti tawuran antara Luwu dengan Bone, atau Makassar dengan Luwu.

“Di Selatan kota yang masih sering bentrok karena alasan sentimen kesukuan. Suku-suku yang sering bentrok seperti Luwu melawan Bone, Makassar melawan Luwu. Ada juga Bugis melawan Makassar, dan Jeneponto melawan Bone.”¹³

Kuatnya etnosentrisme ini memang dipengaruhi oleh reproduksi peristiwa masa lalu. Bermula dari konflik kekalahan ayam raja Gowa dengan ayam raja Bone

¹² Pada saat peneliti akan wawancara dengan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ada beberapa mantan aktivis sedang berada di Sekretariat Nasional Demokrat bergabung dengan orang-orang lingkaran Walikota lainnya. Para mantan aktivis tersebut pada saat mahasiswa pernah melakukan aksi demonstrasi dengan menutup jalan walaupun hanya 2-4 mahasiswa.

¹³ Pernyataan Pak Siswa (Staf Humas Polda Sulawesi Selatan) di FGD pada tanggal 21 Juli 2011, pukul 11.00 WITA.

yang membuat raja Gowa malu. Dari peristiwa ini untuk tetap menjaga harga diri (*to barani*) maka konflik kedua kerajaan ini direproduksi terus menerus apalagi pada masa penjajahan Belanda, dimana kerajaan Bone bersekutu dengan Belanda untuk menyerang kerajaan Gowa. Di bawah komando Sultan Hasanudin Kerajaan Gowa tidak mau menyerah ke Belanda walaupun berkali-kali diserang oleh Kerajaan Bone yang dibantu Belanda.

Motif tawuran yang dilatarbelakangi organa ini lebih dikarenakan sentimen kesukuan. Merasa sukunya lebih superior dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Hal inilah yang direproduksi secara terus menerus generasi-generasi selanjutnya, sehingga sentimen kesukuan atau etnosentrisme ini terwariskan. Pengaruh budaya maskulinitas inilah yang membuat masyarakat Makassar terutama mahasiswa mudah melakukan kekerasan dan vandalisme. Kekerasan dan vandalisme tidak dilihat sebagai sesuatu yang buruk tapi justru sebaliknya. Kekerasan dan vandalisme semakin sering dilakukan semakin menunjukkan identitas seorang mahasiswa. Bahkan ada mahasiswa yang menilai tawuran dengan saling melempar batu itu sebagai suatu hiburan, kalau tidak melakukan kekerasan dan vandalisme seolah-olah ada yang kurang.

Namun demikian, diantara semua kampus yang pernah terjadi tawuran dan kekerasan, terutama kampus-kampus swasta dan UIN Sultan Alauddin Makassar yang potensial bermotif kedaerahan dibanding kampus-kampus negeri semacam UNHAS dan UNM. Keterangan ini dikemukakan oleh Pembantu Dekan Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Alauddin, Abdul Wachid.¹⁴ Motif kedaerahan sangat dipengaruhi oleh kondisi asrama mahasiswa di sekitar kampus, khususnya UIN Sultan Alauddin, yang memang kebanyakan menggunakan label kedaerahan. Abdul Wachid memaparkan bahwa di tiap-tiap suku di Makassar umumnya terdapat mitos-mitos yang mengkonstruksi kesadaran masyarakatnya sehingga menjadi lebih unggul

¹⁴ Wawancara dengan Abdul Wachid, Pembantu Dekan III, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Alauddin Makassar, Kamis, 21 Juli 2011, pukul 11.00 di Kampus II UIN Sultan Alauddin.

dibanding yang lain. Suku Bugis, misalnya, yang pada masa lalu memiliki sejarah Kerajaan Bone sebagai kerajaan terbesar di Makassar.¹⁵ Dalam konstruksi budaya masyarakat Bugis, terdapat mitos “Tiga Pilar (*Telung Pocoh*)” yang harus diwujudkan orang per orang sebagai bagian dari suku Bugis. *Pertama*, pilar *Bone* yang berarti keberanian, yakni bahwa orang Bugis haruslah memiliki sifat pemberani di manapun ia hidup. Dalam kehidupan sehari-hari orang Bugis cenderung membawa senjata untuk dapat memiliki sifat keberanian tersebut. *Kedua*, pilar *Soping*, yang berarti kecantikan atau kemuliaan, yakni orang Bugis harus dapat mencapai kecantikan, keindahan dan kemuliaan dalam hidupnya sehingga tampilan fisik orang Bugis sangat diperhatikan untuk membangun kesan wibawa. *Ketiga*, pilar *Wajo*, yang berarti kekayaan, yakni orang Bugis harus dapat mencapai kehidupan yang makmur sejahtera (kaya). Oleh karenanya, pilar ketiga ini mengharuskan orang Bugis untuk memiliki jiwa bisnis yang tinggi.

¹⁵ Sekedar informasi, Bapak Abdul Wachid menyatakan dirinya sebagai keturunan suku Bugis dan cukup memahami bagaimana budaya dan karakter mental orang Bugis.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi aksi-aksi kekerasan dan vandalisme yang dilakukan oleh mahasiswa Makassar. *Pertama*, kekerasan dan vandalisme yang sering dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa Makassar merupakan hasil reproduksi dari sejarah dan nilai-nilai budaya maskulin yang kental dengan nuansa kekerasan. Mahasiswa mewarisi sejarah dan nilai-nilai budaya yang saling menguatkan etnosentrisme. Suku yang satu merasa lebih superior dengan suku yang lain karena mereka memandang atau berorientasi pada masa lalu. Akibatnya kekerasan dan vandalisme merupakan sesuatu hal yang biasa karena sudah terinternalisasi dalam diri mahasiswa Makassar. Bahkan ada sebagian mahasiswa yang menilai kalau kekerasan dan vandalisme merupakan suatu hiburan dan dijadikan sebagai ritual, tidak melakukannya secara periodik seolah-oleh dianggap ada sesuatu yang kurang.

Kekerasan dan vandalisme semakin tumbuh subur karena didukung dengan falsafah yang dianut orang Bugis-Makassar. Beberapa falsafah yang masih dianut sampai sekarang seperti *Mali siparappe* (hanyut daling menyelamatkan), *Rebba sipatokkong* (tumbang saling menegakkan), *Malelu Sipakainge* (terlupa saling mengingatkan), *taro ada taro gau* (berjanji sama menunaikan), *fada idi fada elo* (jalin tekad dalam kebersamaan). Falsafah di atas semakin menguatkan identitas kolektif diantara masing-masing suku.

Sesuai apa yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Aktor dibekali serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan yang mereka gunakan untuk merasakan, mamahami, menyadari, dan menilai dunia sosial. Melalui pola-pola itulah aktor memproduksi tindakan dan juga menilainya. Secara dialektika habitus adalah

produk “internalisasi struktur” dunia sosial. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Disatu pihak, habitus adalah “struktur yang menstruktur” (*structuring structure*) artinya habitus adalah sebuah struktur yang menstruktur kehidupan sosial.

Di lain pihak habitus adalah “struktur yang terstruktur” (*structured structure*) yaitu struktur yang distrukturisasi oleh dunia sosial. Habitus berfungsi di bawah tingkat kesadaran dan bahasa, di luar jangkauan pengamatan dan pengendalian oleh kemauan. Meski kita tak menyadari habitus dan cara bekerjanya, namun ia mewujudkan dirinya sendiri dalam aktivitas kita yang sangat praktis seperti cara kita makan, berjalan, berbicara, dan bahkan dalam cara membuang ingus. Hal ini dialami juga oleh mahasiswa Makassar, ada habitus nilai-nilai budaya masa lalu sehingga terus terwariskan dalam masyarakat.

Kedua, kekerasan mahasiswa juga sebagai pengejawantahan dari tindakan kolektif, dimana tawuran antar fakultas di beberapa universitas. Mahasiswa merasa memiliki rasa kebersamaan atau identitas kelompok sehingga ketika ada salah satu temannya diserang oleh mahasiswa lain terlepas itu salah atau benar langsung dibantu. Bahkan ada beberapa mahasiswi yang justru membantu ketika ada tawuraa. Beberapa mahasiswi membantu mengambil batu untuk sebagai senjata ketika terjadi perang batu.

Menurut David Garrow meski sebagian protes cenderung menimbulkan perilaku kolektif yang bersifat merusak, namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap *collective joy* (kumpulan dengan maksud bersenang-senang) yang dapat menyatu dalam protes atau mengikuti gelombang protes. Bahkan tidak menutup kemungkinan gelombang protes itu sendiri mampu memicu kegiatan-kegiatan lain seperti bentuk perilaku kolektif santai selain keterlibatan protes secara sengaja. Hal ini juga dilakukan oleh mahasiswa Makassar dimana tawuran antar fakultas maupun kekerasan yang dilakukan pada saat demonstrasi merupakan sebuah hiburan, kalau

tidak melakukan teras ada yang kurang, bahkan mahasiswa Makassar melakukan tawuran disertai dengan kekerasan dan vandalisme secara periodik.

Ketiga, aksi demonstrasi mahasiswa yang disertai dengan kekerasan dan vandalisme dilatarbelakangi juga oleh keinginan mahasiswa tampil di publik. Bahkan mahasiswa semakin atraktif ketika aksi demonstrasi yang disertai dengan kekerasan dimuat di media massa. Selain hal di atas tujuan yang ingin dicapai yaitu “klik” dengan elit penguasa. Ada juga mahasiswa yang memanfaatkan relasi dengan elit penguasa tersebut untuk keuntungan pribadi maupun kelompok dan relasi itu dipelihara sampai mahasiswa tersebut lulus.

Keempat, aksi demonstrasi mahasiswa yang disertai dengan kekerasan dan vandalisme memang sudah di *setting* sebelumnya. Tujuannya untuk melakukan koreksi terhadap struktur yang ada. Misalnya aksi demonstrasi mahasiswa yang disertai dengan kekerasan sebagai protes atas kinerja Kapolda yang buruk. Hal ini ternyata terbukti efektif, maka dari itu tidak heran kalau Kapolda Sulawesi Selatan sering berganti.

VI.2. Saran

Dari kesimpulan yang di buat di atas maka ada beberapa saran terhadap kekerasan dan vandalisme mahasiswa di Makassar, antara lain seperti:

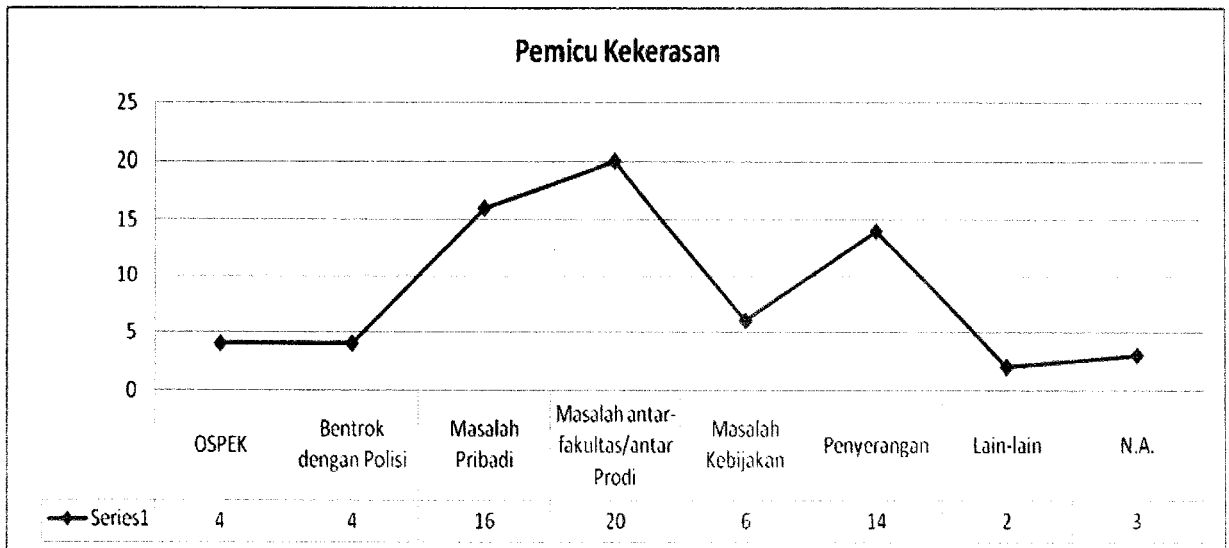
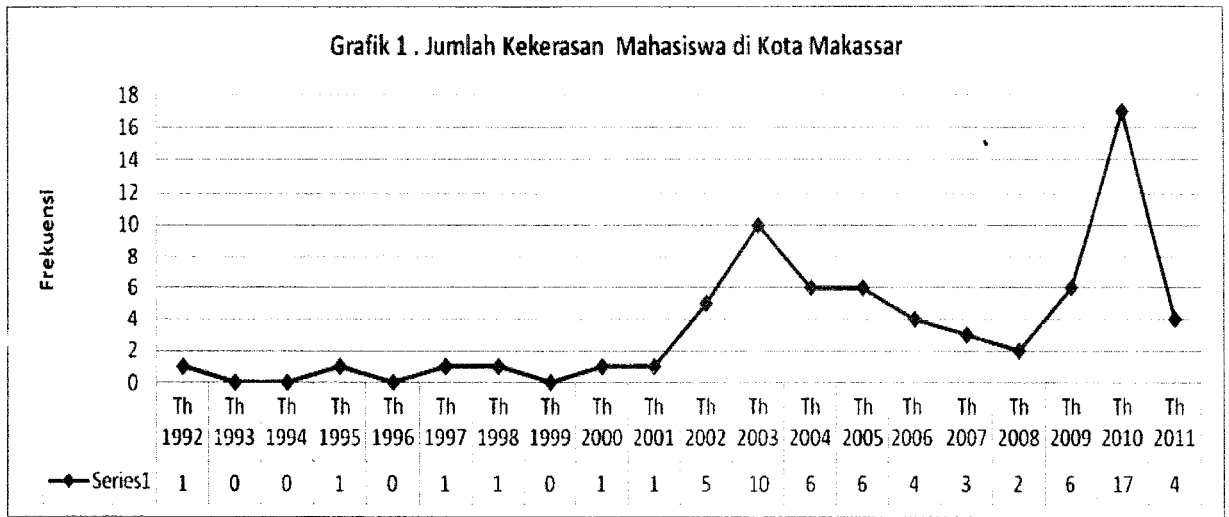
1. Mengurangi reproduksi sejarah dan nilai-nilai budaya masa lalu yang identik dengan maskulinitas berikut kandungan kekerasan di dalamnya. Hal ini sangat mudah memicu kekerasan dan vandalisme masyarakat secara umum dan mahasiswa secara khusus, karena nilai-nilai ini terinternalisasi dalam diri. Bagaimana menguranginya? Salah satu cara yang bisa ditempuh adanya menginternalisasi prinsip-prinsip multikulturalisme dalam kehidupan kampus. Secara sistemik, cara ini juga

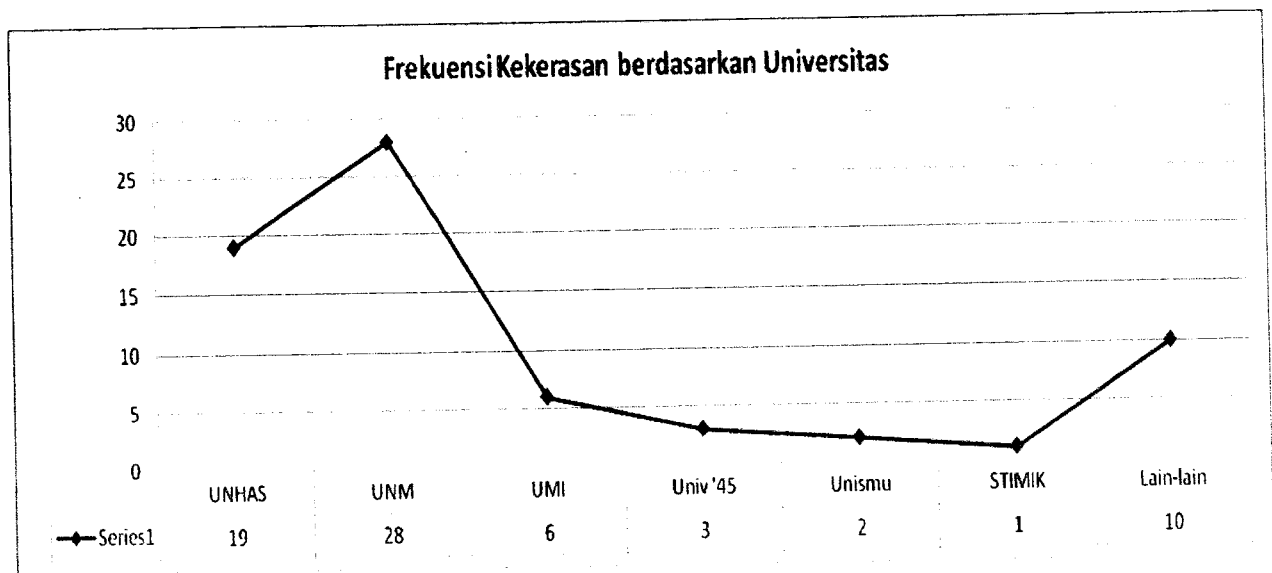
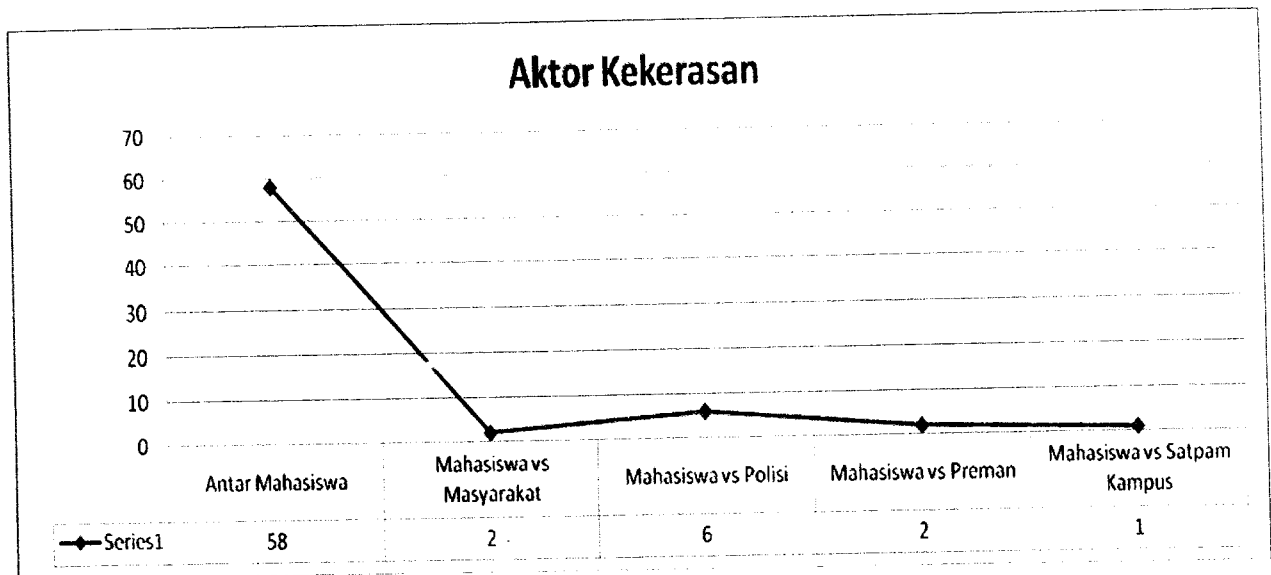
- bisa ditempuh dengan memasukkan prinsip-prinsip multikulturalisme dalam kurikulum pendidikan di kampus.
2. Dilakukan ospek bersama. Mahasiswa dari berbagai fakultas diikutkan setiap kegiatan ospek, sehingga antara mahasiswa jurusan satu dengan yang lainnya saling mengenal. Tentunya untuk menggunakan cara ini harus hati-hati juga. Berbagai langkah teknis bisa dilakukan untuk mencapai tujuan itu diantaranya membentuk panitia Ospek Bersama di kalangan mahasiswa lintas fakultas. Para mahasiswa baru pun sebisa mungkin tidak menonjolkan atribut-atribut perbedaan dari fakultasnya masing-masing, seperti *scraft*, kaos fakultas dan sebagainya melainkan diseragamkan dalam hal pakaian pada saat ospek berlangsung.
3. Perlu dibangun ruang diskusi intensif antara pihak mahasiswa dengan birokrat kampus. Ruang di sini tidak dipahami secara fisik melainkan adanya intensitas komunikasi dialogis antara mahasiswa dengan pihak birokrat kampus untuk membahas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi baik teknis seperti fasilitas-fasilitas kampus maupun non-teknis seperti persoalan kurikulum dan sebagainya.
4. Memberikan ruang diskusi secara berkala anatar muspida dan mahasiswa dengan pemerintah daerah. Hal ini sangat diperlukan untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, sehingga mahasiswa ataupun masyarakat tidak sampai turun ke jalan dalam menyuarakan aspirasinya apalagi disertai dengan menutup jalan yang justru merugikan kepentingan umum.

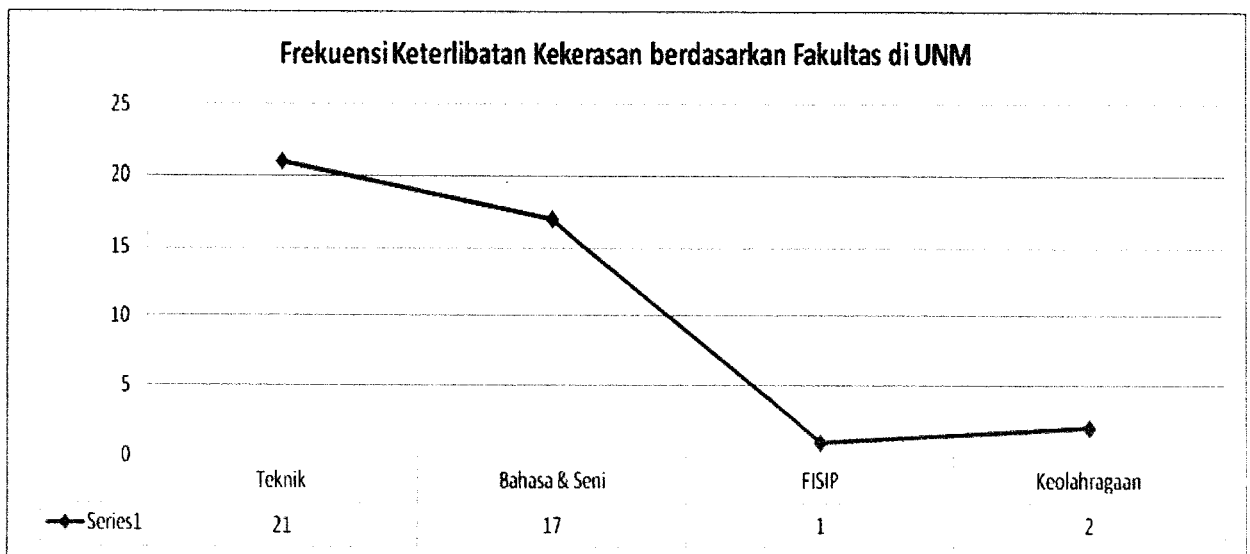
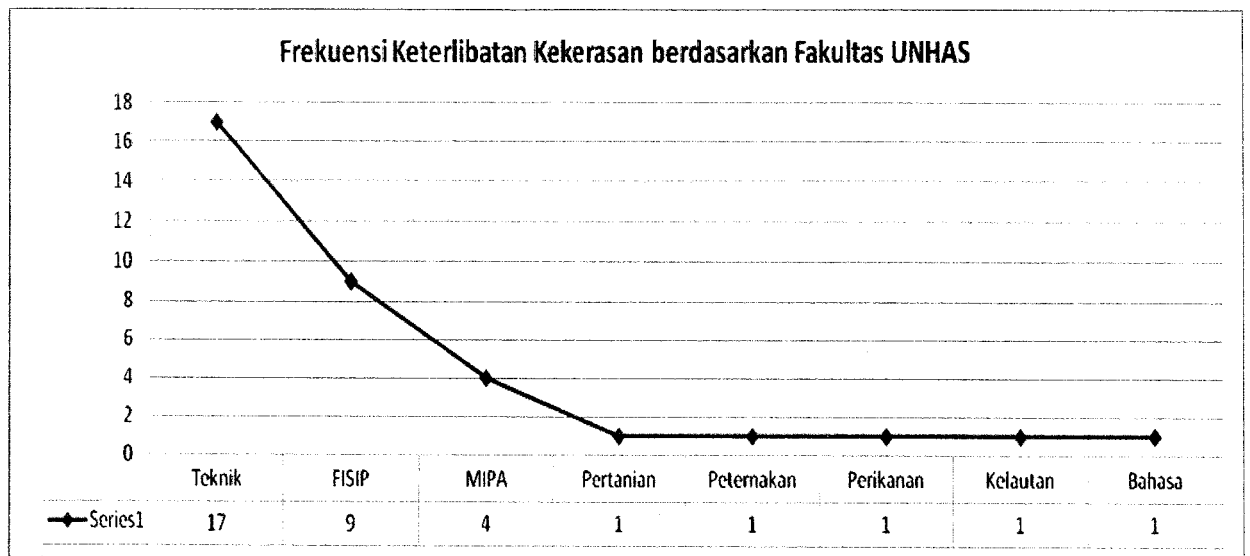
DAFTAR PUSTAKA

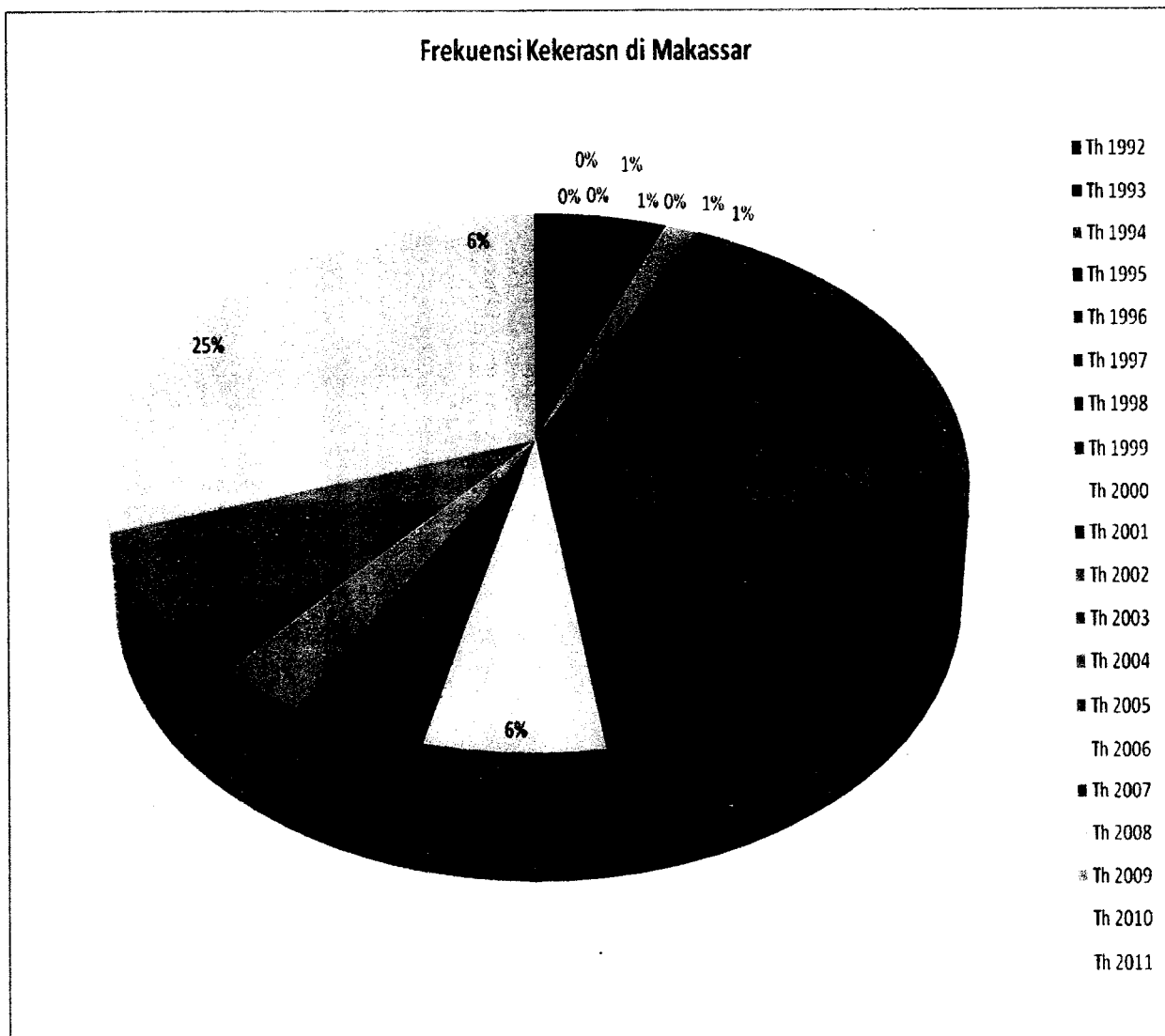
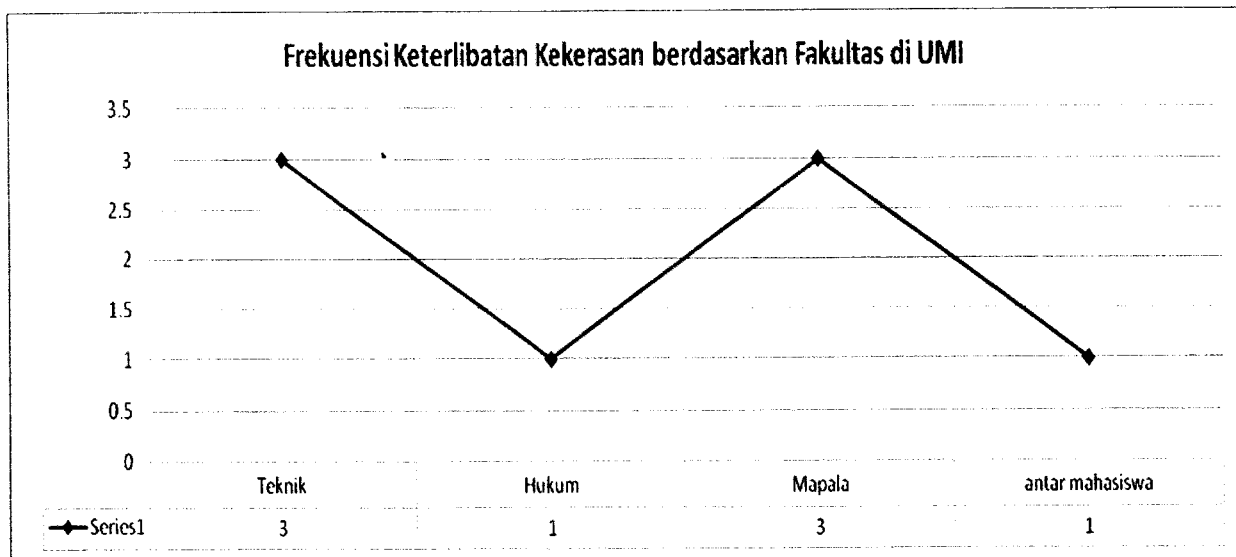
- Archer, Margaret. (1982). "Morphogenesis versus Structuration: On Combining Structure and Action." *British Journal of Sociology*
- Arent, Hannah. (1969). *On Violence*. Harvest Books New York: Harcourt, Brace and World.
- Ashutosh Varshney, Rizal Panggabean, Mohammad Zulfan Tadjoeuddin. (2004) "Patterns of Collective Violence in Indonesia, 1990-2003, Working paper series (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery).
- Bourdieu, Pierre. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University Press.
- _____. (1984). *Distinctions: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- _____. 1990. *In Other Words: Essays toward a Reflexive Sociology*. Cambridge, UK: Polity.
- Creswell, John W, (2002). "*Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*", terj: Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerja sama dengan Nur Khabibah, Kata Pengantar: Parsudi Suparlan, Jakarta, KIK Press
- Eller, David. (2006). *Violence and Culture: A Cross-Cultural and Interdisciplinary Approach*. Thomson and Wadsworth
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley, CA: University of California Press.

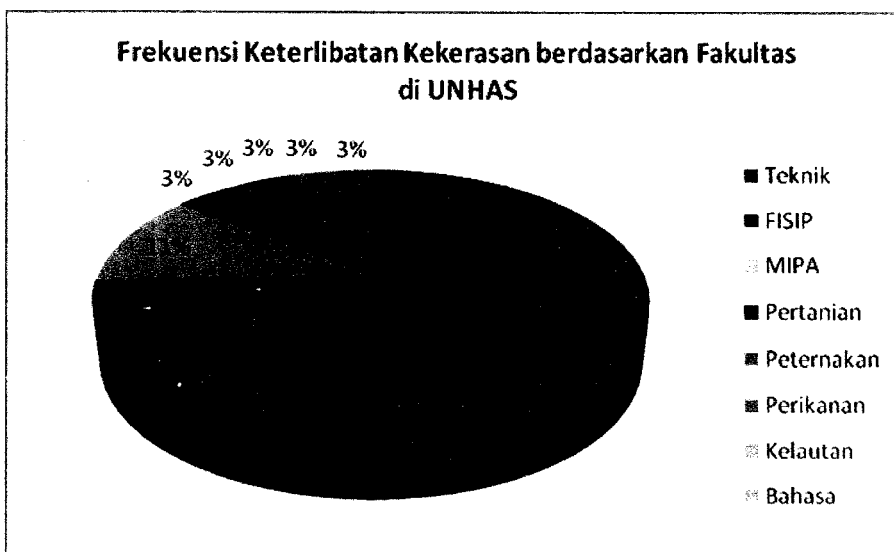
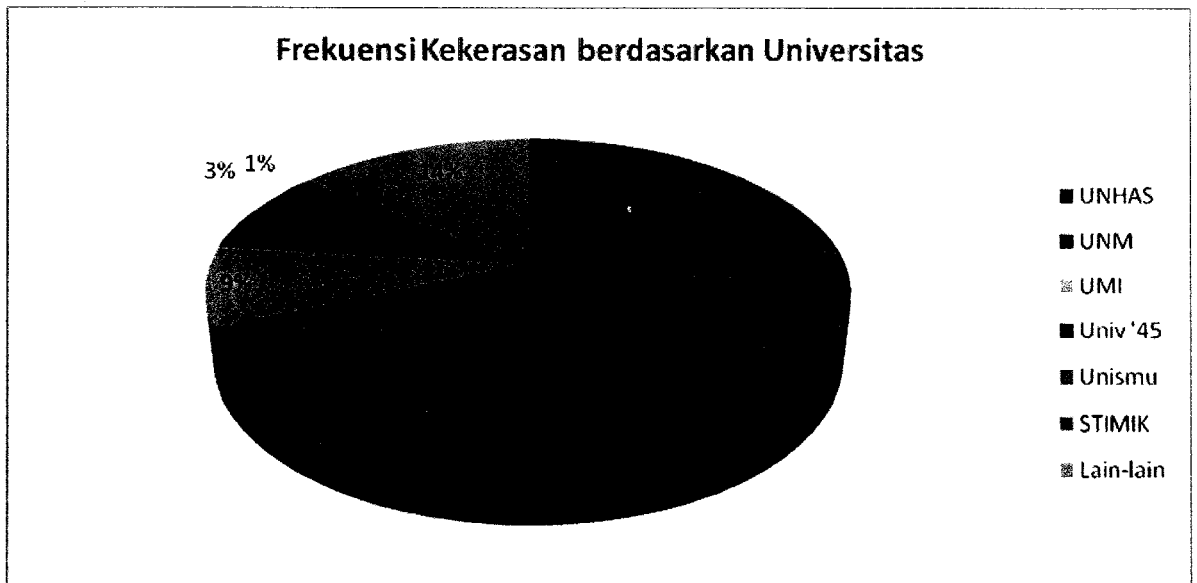
- _____. 1989. "A Reply to My Critics." Pp. 249–301 in *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics*, edited by D. Held and J. B. Thompson. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Gurr, Ted Robert. 1970. Relative Deprivation and the Impetus to Violence, dalam *Why Men Rebel*, Princeton, Princeton Univ.Press
- Habermas, Jürgen. 1987. *The Theory of Communicative Action*. Vol. 2, *Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Boston, MA: Beacon.
- _____. 1991. "A Reply." Pp. 215–64 in *Communicative Action: Essays on Jürgen Habermas's "The Theory of Communicative Action,"* edited by A. Honneth and H. Joas. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Keane, John. (2004) *Violence and Democracy*. Cambridge University Press.
- Laclau, E. (1991). "Community and Its Paradoxes: Richard Rorty's "Liberal Utopia"" i M. T. Collective. *Community at Loose Ends*. Minneapolis, University of Minnesota Press
- Lofland, John. (2003). "PROTES". Yogyakarta:INSIST Press.
- Muzaqqi, Fahrul, "*Diskursus Demokrasi Deliberatif Pasca-Orde Baru: Analisa Teoretik Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*", SKRIPSI, Surabaya: Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga, 2008 (Belum pernah diterbitkan).
- Porta, Donatella Della dan Mario Diani .(2006). *Social Movement: An Introduction*, USA, Blackwell Pub.
- Sagimun, M.D., (1986). *Sultan Hasanuddin Menentang VOC*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pembinaan Pendidikan Moral Pancasila,.
- Schmidt and Schroder (2001). *Anthropology of Violence and Conflict*. Routledge.



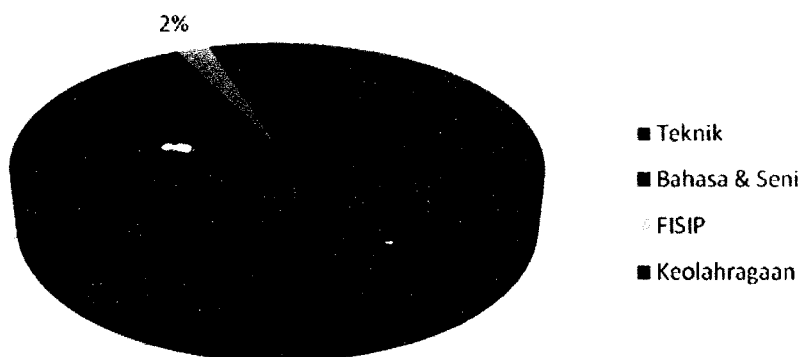








Frekuensi Keterlibatan Kekerasan berdasarkan Fakultas di UNM



Frekuensi Keterlibatan Kekerasan berdasarkan Fakultas di UMI

